

Edisi Magang
MEI 2013



SLiLiT **ARENA**

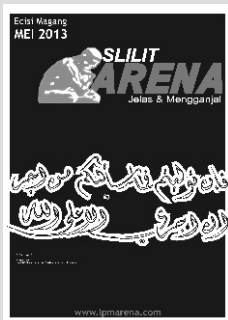
Jelas & Mengganjal



QS Yunus ayat 72

Kaligrafi oleh:
Zaenal Muttaqin, mahasiswa PBA Fak. Tarbiyyah & Keguruan

www.lpmarena.com



SLiLiT ARENA

Diterbitkan Oleh:
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM)
ARENA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pelindung
Allah s.w.t

Penasehat
Rektor UIN Suka

Pembina
Abdur Rozaki, S.Ag, M.Si

Pemimpin Umum
Taufiqurrohmah

Wk. Pemimpin Umum
Ahmad Jamaludin

Sekretaris Umum
Ayu Usada Rengkaning Tyas

Bendahara
Puji Hariyanto

Dewan Redaksi
Anik Malussoleha, Munfa'ati

Pemimpin Redaksi
Robi Kurniawan

Redaktur Online
Folly Akbar

Redaktur SLiLiT
Januardi Husin S

Koordinator Liputan
Noer Hafsanatul H

Reporter
Noer Hafsanatul H, Ulufun Ni'mah,
Imra'atu S, Istikhana NH, N Elmi, Andy R,
Fendi, Arif, Lilik, Khusni H, Chusna, Lugas,
Mugiarjo, Ulfatul F, Anis, Dedik, Rian

Rancang Sampul & Tata Letak
Sabik

Fotografer
Abdul Majid

Direktur Perusahaan & Produksi
Intan Pratiwi

Koordinator Pusda
Hasbullah Syarif

Koordinator Jarkom
Ardi Hartanto Saputra

Koordinator PSDM
Ahmad Taufiq

Kantor Redaksi/Tata Usaha
Student Center Lantai 1 No. 1/14
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Laksda Adi Sucipto Yogyakarta 55281
Telp. 085282638050 (Intan Pratiwi)
http://www.lpmarena.com

4| Mahasiswa Tak Pahami Regulasi Presensi

Presensi 75% telah menjadi regulasi di kampus putih ini, namun banyak mahasiswa yang tak mengerti perhitungan presensi, padahal peraturan ini telah bergulir sejak tahun 2008 silam.

6| Mengakali Prosedural Demi Untung

Penyewaan fasilitas kampus jadi ladang bisnis laris manis bagi beberapa oknum.

10| 100 Mb Bikin Galau

Sejak akhir tahun 2011 semua mahasiswa dapat mengakses Internet un-limited di seluruh area kampus, namun awal Maret 2013 akses *wifi* dibatasi 100 Megabyte (Mb) per hari.

12| Terdakwa Pembebasan Intelektual

"Sosialis teroris", "diktator intelektual", "pemimpin pemujaan", "guru", dan "nabi". Pada beberapa kalangan yang memujanya, dia bahkan dianggap

14| Sepeda Keranjang Sri Tanjung

Tersiarlah kabar di Pasar Kotagede tentang munculnya Sri Tanjung. Orang-orang akan mengerutkan dahi dan ingatannya akan menjalar pada sebuah cerita rakyat dari Tanah Banyuwangi.

18| Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik Dan Empirik

Buku ini menjelaskan sistem politik di Indonesia yang tidak semata-mata hanya bersifat teoritis namun

5| Awalnya Ingin Tiga Jutaan

Setelah menjadi Fakultas dengan biaya termahal di UIN Suka, kini ingin menaikkan biaya SPP yang biasanya hanya 600 ribu rupiah. Namun, hal ini urung direalisasikan pihak Universitas.

8| Ingin Bermutu, Mahasiswa Malah Bingung

Konversi mata kuliah memaksa mahasiswa mengikuti aturan baru yang dibuat. Sebagian mahasiswa masih merasa hal ini membingungkan dan

11| Kemana DPP Kita (?)

DPP adalah dana penunjang pendidikan, dari dan untuk Mahasiswa. Namun sayangnya, saat ini banyak dari mahasiswa yang tidak tahu apa itu DPP dan ke mana saja dana tersebut dialirkan.

13| Demokrasi Tanpa Kesejahteraan

"Tidak ada demokrasi tanpa politik, tidak ada politik tanpa partai, dan tidak ada partai tanpa kompromi." Demikianlah ungkapan dari ilmuwan politik Clinton

17| FTK Buka Jurusan Baru

Setelah mengganti KI dengan MPI, FTK resmi membuka jurusan PGRA pada tahun ajaran 2013/2014

19| Shohifur Ridho Ilahi: Sastra, sebuah Ekspresi Realitas

"Menggeluti teater dan sastra merupakan sebuah ekspresi kebudayaan"

SLiLiT ARENA mengundang semua kalangan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga untuk mengirimkan tulisan maupun artikel ke alamat redaksi LPM ARENA. Dan bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan pemberitaan SLiLiT ARENA, bisa menuliskan hak jawabnya, atau datang langsung ke kantor redaksi LPM ARENA guna berdiskusi lebih lanjut.

Wartawan SLiLiT ARENA dibekali tanda pengenal dalam setiap peliputan dan tidak menerima amplop dalam bentuk apapun



SURAT PEMBACA

Mana yang Didahulukan: *Primary* atau *Secondary*?

Salam Integrasi-Interkoneksi untuk bapak Rektor kampus perjuangan. Ada *something* yang menjadi kegelisahan di lubuk hati saya. Kalau kita perhatikan kemajuan UIN Suka sudah sangat luar biasa dan itu memang sudah sebuah keharusan. Tapi bersamaan dengan kemajuan itu masih ada yang menurut saya mungkin belum terpikirkan.

Kita ketahui bersama bahwa para mahasiswa yang katanya ujung tombak masa depan bangsa, mayoritas sudah melalaikan kebutuhan pokok (primer) seperti kepemilikan buku referensi mata kuliah. Lebih mengutamakan kebutuhan tambahan (sekunder), yang lebih tinggi biayanya dibandingkan dengan membeli buku referensi mata kuliah terkait.

Hal ini perlu dikaji ulang oleh pihak yang bertanggung jawab agar mahasiswa lebih tersentuh dengan keilmuan yang diharapkan UIN. Menurut saya, pak Rektor atau pembantu Rektor bagian akademik harus ambil sikap dan menggunakan teori "*Allahumma bil faksah*" yakni membuat aturan wajib kepada mahasiswa untuk memiliki buku referensi setiap mata kuliah. Minimal satu buku setiap mata kuliah agar uang yang dimiliki tersisihkan untuk buku referensi, bukan dibiarkan hanyut dengan kemajuan teknologi begitu saja.

Kuangan sebagian mahasiswa hanya untuk kebutuhan sekunder, seperti: *SMS*, *smart*, modem, khayalan di dunia maya, hiburan dan lain-lain. Sehingga jatah untuk membeli buku direbut dan dirampas oleh kebutuhan sekunder tersebut. Untuk itu sudah saatnya pihak kampus mengambil sikap yang lebih maslahah. Amin.[]

**Abdul Kirom, mahasiswa jurusan Akidah dan Filsafat
FUSAP, semester dua**

Sebaiknya Ada Asrama UIN

Salam kepada kampus putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menurut saya fasilitas yang sudah disediakan oleh kampus terhadap mahasiswa sudah sangat cukup memadai, tapi bagi saya cuma satu kekurangan kampus yang menjadi pertanyaan di benak saya dari dulu sampai sekarang, kenapa di kampus UIN Suka belum didirikan atau dibangun sebuah asrama atau pondok untuk para mahasiswa yang ingin *mondok* atau tinggal di dalam kampus. Seperti kampus lain begitu. Misalnya di Malang. Padahal di UIN kan banyak sekali tempat-tempat atau bangunan-bangunan yang masih kosong yang menurut saya mengapa tidak dijadikan tempat untuk menampung para mahasiswa yang mungkin berkeinginan tinggal di dalam kampus (asrama).

Ataukah ada suatu hal yang mungkin melatarbelakangi semua ini. Mungkin keterbatasan pengajar yang tidak ada untuk menjadi ustadz atau ustadzah yang mengawas atau mengelola di asrama?

Di sisni saya bukan mengkritik pihak kampus. Tapi disini saya hanya bertanya kenapa di kampus UIN tidak di bangun sebuah pondok atau asrama?[]

**Halimatussakdiyah, mahasiswa Jurusan Sosiologi
Agam FUSAP, semester dua**



CATATAN KAKI

Konsistenlah Pak Dosen

Di sebuah ruang kelas UIN Sunan Kalijaga, seorang dosen berkata, "Seorang ilmuwan boleh salah tapi tidak boleh bohong." Di lain kesempatan, dosen itu tidak masuk hingga beberapa kali pertemuan. Pada pertemuan berikutnya, dia meminta mahasiswanya untuk mengisi presensi yang kosong di pertemuan-pertemuan yang dia tidak masuk kemarin.

Jam-jam pelajaran yang *tak* terisi pada pertemuan sebelumnya itu seakan jadi tidak perlu diisi karena kolom-kolom presensi yang kosong telah diperintahkan untuk diisi. Materi ajar yang seharusnya juga disampaikan pada jam-jam itu menjadi *tak* tersampaikan—dan memang tidak mungkin disampaikan karena lagi-lagi kolom presensinya sudah terisi.

Di kelas yang berbeda, dosen yang lain begitu bersemangat menjelaskan bahwa mahasiswa itu harus inovatif. Gerak laku yang dilahirkan oleh seorang mahasiswa haruslah mencerminkan progresifitas. Jangan sampai kehidupan ini stagnan, berjalan apa adanya, tanpa perubahan yang berarti setiap saatnya.

Intinya adalah, dengan setiap tutur kata yang terlontar, sikap yang ditunjukkan, serta pemikiran yang digelontorkan di ruang kelas, dosen itu mampu menghipnotis mahasiswa untuk benar-benar menjadi pencipta perubahan. Pada saat ujian mata kuliah tersebut berlangsung, muncul kegaduhan. Beberapa mahasiswa mengerutu, "*yeaah*, ini kan soal tahun lalu. Ah, menyesal aku tidak belajar dan berusaha *ngejawab* soal-soal sebelumnya." Mereka tahu bahwa soal-soal itu persis dengan soal-soal kakak tingkatnya bahkan kakak tingkatnya lagi karena mereka mengoleksi soal-soal sebelumnya. *Tak* hanya itu, SAP dan *hand out* pun tak jarang yang diedarkan oleh para dosen dari tahun ke tahun tanpa revisi.

Di ruang kuliah yang lain, dalam setiap pertemuan, seorang dosen begitu berapi-api memotivasi mahasiswanya untuk berpikir dan bersikap kritis. Materi kuliah yang diajarkan, kedisiplinan dan pengorganisasian materi kuliah dan penugasan yang disajikan kepada mahasiswanya membuat para mahasiswanya segan untuk tidak mengikuti kelasnya—untuk tidak mengatakan *mbolos*. Dan untuk mata kuliah itu, selama satu semester berjalan 'baik-baik' saja. Efektif, efisien, terarah, dan menyenangkan.

Ternyata tidak berhenti di situ, karena pada semester selanjutnya seorang kawan curhat tentang kejengkelannya mengikuti mata kuliah ini. Nilainya *tak* sedap dipandang, padahal dia memenuhi 75% dan mengerjakan semua tugas. Dengan sedikit unsur kecurigaan, kawan tersebut mengatakan bahwa yang membuat dia demikian adalah karena dia seorang aktivis. Dugaannya ini didasari pada apa yang dialami oleh kakak kelasnya yang sama-sama aktivis.

Ketika ditanya jalan keluarnya, kemarahannya tambah meledak-ledak. Karena setelah dipikir-pikir tidak ada jalan lain kecuali mengulang mata kuliah tersebut. Untuk melakukan complain kepada dosen yang bersangkutan, jelas hanya akan memperunyam persoalan. Sebab ternyata menurut penuturan kawan, sang dosen tidak suka dibantah atau tampak gelagat untuk menentangnya. Ancamannya, yang bersangkutan akan di-*titeni* dan nilai pun terancam.

Potret-potret laku dosen di atas hanyalah bagian kecil dari segunung tindak-tanduk mereka yang kurang wajar. Apa yang saya bidikpun adalah sesuatu yang wajar dikatakan sebagai kesalahan yang manusiawi serta dapat dimaklumi. Bahkan jika dibandingkan dengan kelakuan-kelakuan dosen yang lebih "parah" dari itu, apa yang dipaparkan di atas merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja dan tidak terlalu bermasalah. Sebab dedikasi mengajar dan usaha untuk memberikan yang terbaik kepada pendidikan masih tampak di sana. Namun sebenarnya yang saya bidik dalam beberapa potret tersebut adalah konsistensi: kesesuaian antara ucapan dan sikap atau tingkah laku yang paling sederhana sekalipun. Karena kesesuaian ucapan dan tindakan adalah sebetulnya kejujuran dan kemurnian sikap.[]

**Noer Hasanatul Hafshaniyah
hasanahhafshaniyah@yahoo.com**

Mahasiswa Tak Paham Regulasi Presensi

Presensi 75% telah menjadi regulasi di kampus putih ini, namun banyak mahasiswa yang tak mengerti perhitungan presensi, padahal peraturan ini telah bergulir sejak tahun 2008 silam. Lemahnya sosialisasi ditengarai sebagai penyebabnya.

Oleh: Usman Hadi

Berdasarkan SK Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta No. 119/2008, tentang Pedoman Operasional Perhitungan Presentase Kehadiran Kuliah Mahasiswa UIN Suka, disebutkan bahwa, "75% adalah kehadiran minimal yang wajib dipenuhi mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). Kehadiran 75% dihitung dari jumlah tatap muka dosen/asisten dengan mahasiswa. Dan bila kehadiran 75% tidak terpenuhi, maka dapat diberikan toleransi 50% tatap muka dan 25% kegiatan pengganti kehadiran, yaitu kegiatan kokurikuler, ekstra kurikuler, dan karena musibah atau sakit".

Dudung Abdurrahman, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (Fishum) menuturkan, berdasarkan peraturan resminya, presensi mahasiswa minimal 75%. "Jadi yang 25% mau izin atau mau tidak, istilahnya bolos, tidak apa-apa. Lebih lanjut, dalam SK di atas disebutkan ada dispensasi dari 75% presensi minimal menjadi 50% presensi, dengan syarat yang 25% diganti dengan kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, karena musibah atau sakit, asalkan menunjukkan surat keterangan," jelasnya, Senin (25/03).

SK ini merupakan hasil kesepakatan antara pimpinan universitas dengan pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Suka, pada hari jumat (24/10/2008), tentang konsep presensi 75% bagi mahasiswa. Kemudian hasil rapat ini ditindaklanjuti oleh pimpinan universitas dan menjadi ketetapan sejak 31/10/2008, pada era kepemimpinan Amin Abdullah. "SK ini merupakan hasil dari tarik ulur antara PR III, PD I, serta PD III tentang dispensasi presensi mahasiswa. Kemudian SK ini menjadi ketetapan sejak tahun 2008," kata Dudung.

Hampir selama lima tahun setelah dikeluarkannya SK perhitungan presensi kehadiran ini, ternyata masih banyak mahasiswa yang belum tahu tentang regulasi presensi tersebut. Hal ini menggambarkan lemahnya sosialisasi dari pihak universitas untuk mensosialisasikan regulasi presensi mahasiswa sebagaimana SK ini. Lemahnya sosialisasi dapat dilihat dari kegiatan Sospem (sosialisasi pembelajaran) di setiap tahunnya. Para

pemateri tidak pernah memberikan penjelasan secara gamblang terkait regulasi presensi mahasiswa. Yang ditekankan hanya presensi 75% menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh mahasiswa, tanpa penjelasan lebih lanjut tentang regulasi presensi.

Lahiq misalnya, mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab (BSA) semester II menuturkan, ia tak tahu menahu tentang regulasi presensi sebagaimana SK di atas. Ia juga menuturkan *tak* pernah ada sosialisasi dari pihak kampus baik waktu OPAK maupun Sospem terkait regulasi presensi tersebut. "Wah *gak* tahu, tak pernah ada sosialisasi. Waktu OPAK dan Sospem juga tak diberi tahu," terangnya.

Ketidaktahuan juga dilontarkan oleh Saiful, mahasiswa jurusan Keuangan Islam (KUI) semester IV, saat ditanyai oleh *ARENA* terkait kebijakan regulasi presensi sebagaimana yang tertuang dalam SK. "Belum tahu! Kebanyakan *temen-temenku* juga banyak yang belum tahu," ujarnya.

Lemahnya sosialisasi juga disesalkan oleh Dudung. "Seharusnya di Sospem dan OPAK dilakukan sosialisasi terkait dengan SK tersebut. Selama ini ketika saya mengajar baik di Fishum maupun di Fakultas Adab banyak teman-teman mahasiswa yang kebingungan ketika saya menjelaskan regulasi presensi ini. Padahal regulasi presensi ini merupakan keringanan yang cukup efektif dan semua pihak tidak merasa dirugikan serta mahasiswa tidak merasa terbebani dengan resensi," keluhnya.

Sejauh ini upaya sosialisasi yang ramai terdengar hanya di Fakultas Dakwah, terutama sejak dikeluarkannya surat edaran UIN/02/DD/PP.00.9/295/2013 18 Februari 2013 tentang prosedur tidak masuk kuliah. Surat ini merupakan tindak lanjut dari SK Rektor 31 Oktober 2008. Akan tetapi mulai ditetapkan secara resmi para hari Rabu (20/03), kemarin. "Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari SK dispensasi presensi tahun 2008. Tidak mungkin kita mau buat peraturan sendiri. Kita hanya mau menegakkan aturan dari Rektorat," terang Sri Haryani, Pembantu Dekan III (bagian kemahasiswaan) Fakultas Dakwah saat ditemui di kantornya, Senin (25/03).

Terkait dengan prosedural pengajuan

dispensasi, Dudung menjelaskan bahwa dalam pengajuan dispensasi, mahasiswa hanya cukup melampirkan surat keterangan sakit atau surat keterangan kegiatan yang diketahui oleh PD III, dan disampaikan kepada PD I, kemudian diserahkan kepada petugas presensi.

Sementara di Fakultas Dakwah, peraturan ini disederhakan. Mahasiswa hanya cukup mengisi surat izin dan disertai dengan surat keterangan mengikuti kegiatan yang dilampirkan. Setelah itu diberikan ke Sigit, petugas bagian presensi di Fakultas Dakwah. Peraturan ini disederhanakan karena banyaknya keluhan dari mahasiswa yang menganggap peraturan baru ini menyulitkan. Kemudian hal ini ditindaklanjuti oleh pihak fakultas yang selanjutnya disusul dengan penyederhanaan peraturan tersebut.

Meskipun demikian, banyak mahasiswa yang menganggap regulasi baru di Fakultas Dakwah ini justru menyusahkan mahasiswa. "Regulasi baru itu sangat mempersulit mahasiswa mas! Bagaimana tidak sulit, izin lewat SMS *aja gak* boleh, harus *pake* surat. *Kasian* mereka yang punya kegiatan di luar kampus, susah izinya," keluh mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS), Ayu yang sekarang duduk di semester IV.

Namun di lain pihak, Sri Haryani menganggap bahwa regulasi presensi yang diterapkan di Fakultas Dakwah tidaklah mempersulit mahasiswa, "Mempersulit bagaimana? Regulasi ini sebenarnya untuk mempermudah mahasiswa. Mahasiswa hanya tinggal menyerahkan surat keterangan sakit atau surat keterangan kegiatan sebagai bukti ada halangan tidak masuk kuliah, dan hanya cukup mengisi surat keterangan izin yang bisa diambil dari petugas absensi," sanggahnya.

Sedangkan batas terakhir penyerahan surat izin pun cukup panjang. Dalam jangka waktu dua minggu mahasiswa masih bisa menyerahkan surat izin. "Menurut SK itu, penyerahan surat izin paling lambat dua minggu setelah kejadian. Jadi sangat disayangkan bagi para mahasiswa yang tidak mau mengurus surat keterangan," ungkap Dudung dengan nada kecewa.[]

Awalnya Ingin Tiga Jutaan

Setelah menjadi Fakultas dengan biaya termahal di UIN Suka, kini ingin menaikkan biaya SPP yang biasanya hanya 600 ribu rupiah. Namun, hal ini urung direalisasikan pihak Universitas

Oleh: Imroatus Sa'adah

Seiring dengan penerimaan mahasiswa baru, informasi tentang biaya registrasi pun mulai beredar. Dalam selebaran informasi biaya registrasi, terdapat salah satu fakultas, yang menjadi sorotan karena biaya yang ditetapkan dipandang mahal, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) biaya masuk FEBI Rp. 3.850.000,-. Sedangkan biaya fakultas-fakultas lain hanya sekitar dua jutaan.

Mahalnya biaya masuk FEBI dikarenakan fasilitas yang akan diberikan kepada para mahasiswanya berbeda dengan fakultas lain. Fasilitas yang disediakan antara lain, adanya praktikum, *bridging course*, serta pengembangan kompetensi. Selain itu, yang mendorong FEBI memberikan fasilitas yang lebih adalah karena keinginan FEBI untuk menjadi kelas Internasional.

Pada akhir semester satu, ada sebuah pemberitahuan yang cukup mengejutkan bahwa biaya di FEBI akan naik mencapai tiga sampai empat juta persemester. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya fasilitas-fasilitas yang berbeda dengan fakultas lain. Dengan adanya pemberitahuan yang dianggap mendadak itu, terjadi banyak ketidaksetujuan, terutama mahasiswa FEBI yang mana pada semester satu merasa belum menikmati fasilitas-fasilitas yang telah dijanjikan oleh pihak fakultas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diadakan audiensi antara mahasiswa dengan pihak fakultas pada bulan Desember 2012 silam di gedung rektorat. Hasil dari audiensi itu adalah pihak fakultas memberi diskon sebesar 50% untuk biaya pengembangan kompetensi dan 20% untuk biaya *bridging course*. Pemberian diskon tersebut sebagai tanda permintaan maaf pihak fakultas kepada mahasiswa FEBI tahun ajaran 2012-2013 karena tidak mengumumkan biaya tersebut pada awal pendaftaran.

Setelah itu, fakultas mengajukannya kepada pihak rektorat. Akhirnya diadakan rapat antara pihak fakultas dan pihak rektorat. Rapat tersebut menghasilkan suatu keputusan yang tidak menyetujui kenaikan biaya FEBI. "Karena UIN masuk kategori rendah dalam soal biaya pendidikan tingkat universitas se-DIY, UIN tidak diperbolehkan menaikkan biaya setinggi-tingginya," kata

Nizar Ali, mantan Pembantu Rektor Bagian Umum (PR II) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Bagian Keuangan dan Administrasi. Selain itu, Nizar menambahkan, pemberitahuan tersebut mendadak dan tidak diberitahukan ketika awal pendaftaran. Sehingga ini menyalahi sistem UIN yang menganut system terbuka. "Jika hal ini dibiarkan, akan dapat menurunkan kepercayaan publik kepada UIN karena ini dapat dikategorikan sebuah penipuan," ungkapnya lagi.

Nizar mengaku tidak tahu dasar kenaikan biaya di FEBI. Dirinya tahu setelah pihak FEBI meminta izin kepada pihak rektorat. "Jika pihak FEBI ingin menaikkan biaya, harus sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan oleh UIN, seperti biaya praktikum di Fakultas Sains dan Teknologi sebesar tiga ratus ribu rupiah," tambah Nizar Ali.

"Karena UIN masuk kategori rendah dalam soal biaya pendidikan tingkat universitas se-DIY, UIN tidak diperbolehkan menaikkan biaya setinggi-tingginya"

Turunnya biaya FEBI berpengaruh pada pengurangan fasilitas-fasilitas yang telah dijanjikan oleh FEBI, seperti pengurangan jatah *bridging course* yang semula akan dilaksanakan dari semester satu sampai semester enam, kini hanya akan dilaksanakan sampai semester tiga saja.

Dalam hal ini, Dekan FEBI Ibnu Qizam tidak bersedia banyak berkomentar. Ibnu Qizam hanya mengatakan, FEBI akan menaikkan biaya jika SK tahunan sudah turun dan sudah ada pemberitahuan dari pusat dan pihak universitas.

Turunnya biaya di FEBI menyebabkan munculnya berbagai pandangan di kalangan mahasiswa. Seperti Usman Mubarak, mahasiswa jurusan Perbankan Syari'ah itu menyatakan, turunnya biaya di FEBI menjadi 600 ribu rupiah belum dapat dianggap adil karena belum tentu orang yang tidak mampu menganggap bahwa biaya 600 ribu itu termasuk murah. "Jika keadilan itu

disamaratakan, maka yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin akan semakin miskin. Dengan biaya 600 ribu, bagi orang yang mampu atau kaya, itu adalah biaya yang kecil sehingga bagi orang mampu bisa menggunakan sisa uangnya demi kepentingannya sendiri. Sedangkan bagaimana nasib orang yang tidak mampu? Apakah mereka juga menganggap kalau biaya 600 ribu itu murah? Atau bahkan masih dianggap mahal?," resah Usman.

Usman juga mengatakan, untuk dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas, maka biaya finansial bukanlah hal yang tabu lagi. "Saya yakin kalau semua mahasiswa baik yang mampu atau pun yang tidak mampu ingin memperoleh pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu, diharapkan bagi yang mampu itu mau berbagi dan membantu yang tidak mampu sehingga yang tidak mampu tidak merasa dirugikan," ucap Usman lagi.

Berbeda dengan pernyataan Endah Puspitarani yang setuju dengan penurunan biaya FEBI yang dianggap dapat meringankan beban biaya mahasiswa. "Untuk semester dua sampai tiga, biaya 600 ribu masih cukup. Tapi, dengan turunnya biaya FEBI, maka program penunjang yang dijanjikan oleh FEBI juga dikurangi, seperti *bridging course* yang semula diadakan sampai semester enam, kini hanya sampai semester tiga," terang Endah.

Endah juga mengatakan bahwa untuk semester empat dan seterusnya jika ada tambahan biaya, ia juga setuju karena kebutuhan untuk semester empat dan seterusnya akan lebih banyak sehingga membutuhkan biaya juga. "Saya berharap jika suatu saat ada kenaikan biaya, jangan sampai biaya tersebut terlalu mahal. Ya sewajarnya saja," harap mahasiswa Ekonomi Syari'ah itu.

Tidak jauh berbeda dari pernyataan Endah, seorang mahasiswa prodi Ekonomi Syari'ah yang tidak mau menyebutkan namanya juga menganggap bahwa penurunan biaya FEBI itu sudah adil untuk tahun ini karena pada awal pendaftaran, para mahasiswa sudah membayar uang registrasi sebesar Rp. 3.850.000,- yang mana pada semester satu para mahasiswa belum menikmati fasilitas yang telah dijanjikan oleh pihak fakultas. "jadi, kita membayar biaya sejumlah 600 ribu itu sudah menjadi hak kita karena kita belum menikmati fasilitas tapi sudah membayar," tegasnya.

Ia juga setuju jika suatu saat nanti biaya akan naik. Tapi dengan syarat, kenaikan biaya tersebut harus dibarengi dengan fasilitas yang lengkap yang dapat menunjang pembelajaran, bukan hanya sebuah janji belaka.[]

UIN Bukan Pabrik

Bukan hal yang aneh lagi ketika UIN membuka jurusan baru di fakultas. Setelah kemarin mengganti Jurusan Kependidikan Islam dengan Manajemen Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), kini FTK membuka jurusan baru, yaitu Pendidikan Guru Raudhatul Atfhal. Bahkan keputusan yang lebih besar adalah pendirian FEBI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam) dengan berbagai pertimbangan, terutama untuk memenuhi permintaan masyarakat (pasar).

Namun pada perjalanannya, UIN tidak bisa meningkatkan kualitas pendidikan bagi mahasiswa, meski pada tataran yang paling dasar sekalipun. Tak jarang jurusan baru belum memiliki dosen tetap, tak sedikit pula yang mengajar tak sesuai dengan *basic* keilmuannya. Belum lagi permasalahan akreditasi yang dewasa ini menjadi penting bagi *branding* UIN sendiri.

Kualitas suatu jurusan yang paling dangkal misalnya diukur dengan akreditasi. Jurusan-jurusan lama di UIN saja akreditasinya masih jauh dari memuaskan. Namun mengapa justru semakin banyaknya jurusan-jurusan di UIN yang tumbuh bagai cendawan di musim hujan? Sepertinya begitu mudah sebuah jurusan didirikan di UIN.

Seiring berjalannya waktu, Jurusan Sosiologi Agama di Fakultas Ushuludin sepi peminat. Penyusutan peminat terjadi tiap tahunnya. Entah apa sebabnya. Mungkin saja orientasi masyarakat (pasar) telah berubah. Suatu saat nanti UIN akan kelabakan jika peserta didik sama sekali tak berminat dididik di ranah sana. Apakah ditutupnya jurusan juga merupakan hal yang mudah? Jika ya, mengapa seperti hanya uji coba?

Mahasiswa tak lagi menjadi *agent of change*. Mahasiswa saat ini lebih tepatnya menjadi pewaris sekaligus pelanggan suatu sistem yang telah dibangun. Alih-alih menggugat sistem buruk yang ada, mahasiswa justru menjadi kelinci percobaan dari birokrat. Birokrat katanya mengikuti keinginan masyarakat. Lantas dimana letak perubahan yang akan dibangun?

Perguruan Tinggi pada akhirnya urung untuk mencetak generasi penentang. Karena lebih memilih mencetak generasi penurut yang siap saji untuk perusahaan dan instansi. Mahasiswa diajarkan untuk matang di bidangnya. Ikut berpartisipasi dan berkompetisi. Padahal, di sisi lain mahasiswa selalu berteriak menentang kapitalisme, menentang penindasan, menentang *borok* politik.

Ini bukan hal yang sepele. Seringkali banyak dosen yang mengeluh terkait kualitas mahasiswa saat ini yang menurun. Mahasiswa sudah tak memiliki gairah perlawanan terhadap rezim. Tugas-tugas kuliah sudah menjadi orientasi utama ketimbang memperjuangkan hak-hak rakyat. Belajar dengan tekun dan menjadi seorang akademisi yang lurus-lurus saja, dianggap sudah memenuhi kewajiban terhadap rakyat.

Di kampus, yang selalu *dicecoki* kepada mahasiswa tak lain hanya seputar kesuksesan masing-masing setelah lulus. Untuk itu, birokrat telah menyiapkan jurusan-jurusan yang menjanjikan. Lewat *banner*, spanduk, atau pamflet, calon-calon mahasiswa setiap tahunnya disuguhkan dengan iklan-iklan yang menggiurkan. Sungguh tak ada bedanya pendidikan dengan dagangan. Perdagangan pendidikan.

Saat ini, UIN benar-benar harus memperhatikan *core* keilmuan dan ciri khas pendidikan di UIN dibandingkan kampus yang lain. Karena cita-cita dan tujuan pendidikan bukan sekedar mencetak robot atau pekerja, namun mencetak insan akademik yang berkualitas dan mampu memberi kontribusi atas problematika yang terjadi di masyarakat. Memang memenuhi kebutuhan masyarakat (orientasi pasar) tidaklah salah, namun kita bersama yakin, bahwa UIN bukan kampus yang pragmatis, dan tentunya UIN bukan pabrik.[]

Redaksi

Mengakali Prosedural Demi Untung

Penyewaan fasilitas kampus jadi ladang bisnis laris manis bagi beberapa oknum.

Oleh: Andy Robbandy

Tak sedikit acara yang diadakan di UIN Sunan Kalijaga (Suka), mulai dari seminar, bedah buku, atau pertemuan-pertemuan. Bahkan ada acara pelantikan partai. Acara tersebut tentunya membutuhkan tempat yang besar dan luas seperti gedung *Convention Hall*, *Multi Purpose*, *Club House*, Gedung Teatrikal ataupun gedung sejenisnya. Pihak penyelenggaranyapun beragam, mulai dari mahasiswa, dosen ataupun pihak internal kampus. Organisasi intra kampus seperti partai, penerbit buku sponsor lainnya yang berstatus non organisasi kampus juga dapat menyewa fasilitas kampus lewat Satuan Usaha Produktif (SUP).

Tarif penyewaan gedung pun beragam tergantung dari pihak penyewanya, termasuk mahasiswa UIN Suka, yang mendapat potongan harga untuk setiap penyewaan fasilitas tersebut. Kebijakan penetapan tarif penyewaan gedung di UIN Suka ditetapkan oleh Rektorat melalui SK. Selain SK tersebut, terdapat juga kontrak penargetan pendapatan pertahun SUP kepada Rektorat. Sedangkan penyewaan fasilitas dengan tarif murah bahkan gratis diperuntukkan khusus bagi mahasiswa, dosen dan pihak internal melalui Kabag Rumah Tangga kecuali organisasi non kampus. Namun, banyak isu tentang munculnya calo atau terdapat oknum mahasiswa, dosen serta pihak internal kampus yang menyelewengkan surat izin yang diberikan Ketua Bagian (Kabag) Rumah Tangga ataupun SUP untuk organisasi di luar kampus.

Potongan biaya penyewaan dan pemberian surat izin tanpa pengawasan, membuka jalan calo kampus dalam meraup keuntungan dari organisasi luar yang menyewa fasilitas kampus. Dengan potongan atau surat izin tersebut, oknum dapat mengantongi keuntungan yang diperoleh dari sponsor atau organisasi luar yang menyelenggarakan acaranya di gedung kampus UIN Suka.

Terkait kasus tersebut, Basyir selaku Ketua SUP angkat bicara. "Saya secara pribadi belum pernah menangkap basah pelaku tersebut, tapi isu itu ada, termasuk beberapa hari yang lalu ada pemakaian gedung *Convention Hall* yang mengatasnamakan BEM F dan mengatasnamakan fakultas, bahkan surat penyewaan yang diterima SUP itu di tandatangani PD 3," ujar Basyir. "Tapi saya dapat laporan dari lapangan yakni staf SUP yang *menghandle*, bahwa ternyata yang memakai adalah orang luar dan dalam acara tersebut tidak sesuai dengan susunan acara yang tertera dalam surat penyewaan. Jadi terlihat sekali BEM F itu hanya sebagai formalitas atau jalan pintas untuk mendapatkan keringanan dalam penyelenggaraan acara tersebut," jelasnya pada *ARENA*.

Tak hanya itu, Basyir menjelaskan kasus tersebut tidak terjadi satu dua kali, namun dirinya tidak menyebutkan siapa pelakunya. "Waktu itu, ada juga mahasiswa yang menggunakan *Club House* tapi tidak bayar, lima juta tapi sampai sekarang belum bayar. Selain itu ada juga mahasiswa yang menyewa fasilitas lewat Kabag rumah tangga," katanya. Basyir mengaku penyelewengan biaya penyewaan tersebut membuatnya kebingungan, karena SUP pertahun juga harus memenuhi kontrak pertanggungjawaban SUP pada rektorat.

Basyir juga menyayangkan sikap Kabag Rumah Tangga kurang jeli dalam hal prosedural, yang begitu saja memberikan surat izin yang diajukan oleh mahasiswa atau pihak lainnya untuk penyewaan fasilitas kampus. "Ini tentunya membuat saya bingung *mas*, soalnya

saya wajib menyerahkan LPJ pertahun kepada rektorat. Kalau kasus ini terus berlanjut, maka saya yang dapat teguran dari pihak rektorat,” keluhnya.

Salah satu mahasiswa semester IV Fakultas Dakwah, yang tidak mau disebut namanya mengaku pernah menyewa gedung untuk acara organisasinya, ia mengakui dirinya melayangkan surat penyewaan bukan ke SUP tetapi melalui Kabag Rumah Tangga karena dengan begitu, dia tidak harus mengeluarkan biaya penyewaan. Saat ditemui *ARENA*, menurut mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) ini menuturkan, dirinya mendapatkan ide tersebut atas usulan dari seniornya. Hal tersebut terpaksa dia lakukan karena minimnya dana untuk penyelenggaraan acaranya tersebut.

Namun, ia menyangkal hal yang dituduhkan dalam kasus diatas, bahwa acara yang dia selenggarakan *pure* dari organisasinya. “Kalau masalah organisasi luar yang menggunakan nama mahasiswa saya tidak tahu, tetapi acara ini memang *pure* dari organisasi saya,” ujarinya. “Dan kalau penyewaan fasilitas tanpa harus membayar itu memang pinter-pinteran kami saja, ya karena selain biaya penyewaan yang mahal, untuk meminimalisir dana. Dan atas usulan senior saya yang pernah melakukan hal tersebut sebelumnya,” lanjutnya. Walaupun begitu, sebagai mahasiswa dia juga menyadari bahwa tindakannya menyalahi aturan yang sudah ditetapkan.

Dari Kabag Rumah Tangga Ali Sodik juga menanggapi kasus tersebut. Ia menyatakan, penyelewengan surat izin penyewaan fasilitas yang dilakukan mahasiswa seharusnya tidak sepatutnya dilakukan, karena surat izin harusnya dipergunakan untuk organisasi kampus (internal kampus). Ali juga menjelaskan mengenai prosedur penyewaan fasilitas, penyewa harus menyerahkan proposal yang tertera tanda tangan dari berbagai pihak yang bersangkutan.

Ali juga menjelaskan bahwa ia tidak tahu kalau ternyata surat izin tersebut dipergunakan untuk organisasi non kampus atau sponsor. “Memang *mas*, untuk penyewaan gedung bagi mahasiswa itu

kami gratiskan, tentunya dengan prosedur yang sudah ditetapkan, adapun mahasiswa yang menjual surat izin tersebut kami kurang tahu, tetapi kami sendiri tidak diam begitu saja, kami juga akan bertindak dan menindak jika terjadi seperti itu, kalau

terulang kembali.

Fasilitas yang Harus Membayar

Tak sedikit pula mahasiswa yang menyayangkan adanya biaya penyewaan fasilitas kampus. Beberapa mahasiswa beranggapan, semestinya mahasiswa berhak menggunakan fasilitas tanpa harus dikenakan tarif sewa. Namun, fakta lapangan menunjukkan, masih banyak mahasiswa yang harus membayar. Peraturan tersebut dinilai mahasiswa sebagai komersialisasi yang dilakukan instansi kampus.

“*Lah*, fasilitas kampus *kan* harusnya milik mahasiswa. Bukan untuk disewakan. Itu kan dari Negara, lantas jangan oleh instansi kampus dijadikan lahan sewa,” jelas Mudzakir Amin, mahasiswa semester VI, jurusan Tafsir Hadits.

Menurut Dudi Malik, mahasiswa semester II, jurusan Aqidah dan Filsafat, dirinya merasa pembayaran gedung atau lainnya pun sudah dicantumkan dalam pembayaran administrasi mahasiswa ketika pertama masuk dan ketika kenaikan semester.

Menanggapi hal ini, Ali Sodik menyatakan, fasilitas yang dipakai mahasiswa memang tidak membayar dalam hal sewa, hanya pembayaran untuk operasional semata, dari petugas keamanan, petugas kebersihan, peralatan dan lain sebagainya. “Kami juga mengerti *mas* fasilitas ini bukan buat kami, akan tetapi adanya pembiayaan penyewaan fasilitas kampus untuk operasional saja,” jelasnya.

Sedangkan Basyir, Ketua SUP mengatakan, pengadaan biaya tersebut untuk perawatan fasilitas khususnya gedung-gedung di UIN, disamping dana dari pemerintah yang dikucurkan pemerintah tidak mencukupi keseluruhan kebutuhan kampus. SUP juga berfungsi sebagai badan yang menunjang pembangunan dan perekonomian kampus di samping SPP UIN yang tak terlalu mahal. Dia juga menjelaskan perihal kebijakan kampus terkait pengadaan pembiayaan tersebut tak lepas dari sistem pemerintah Negara yang menetapkan otonomi terhadap semua Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

“Yang jelas bahwa di sini juga tidak menginginkan semua fasilitas kampus tidak di kenakan biaya apapun, tetapi semua pembiayaan ini semata-mata *ya* untuk mahasiswa juga,” terangnya.[]



sekarang memang kami baru mengetahui kasus tersebut,” paparnya kepada *ARENA*. Kasus seperti itu menjadi evaluasi bagi SUP dan Kabag Rumah Tangga. *Miss* komunikasi antara SUP dan Kabag Rumah Tangga menjadi kesempatan oknum-oknum tersebut untuk melakukan kecurangan. Pengawasan dan Sistem penyewaan fasilitas yang mestinya di tinjau ulang guna menanggulangi kasus tersebut agar tidak

Ingin Bermutu, Mahasiswa Malah Bingung

Konversi mata kuliah memaksa mahasiswa mengikuti aturan baru yang dibuat. Sebagian mahasiswa masih merasa hal ini membingungkan dan merugikan mahasiswa.

Oleh: Anisatul Ummah

Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang strategis dalam seluruh kegiatan pendidikan. Kurikulum ibarat jalan yang menentukan arah akan kemana dan bagaimana proses pendidikan dilaksanakan. Kurikulum dirancang dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Salah satunya menyesuaikan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat.

Sama halnya dengan yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penggantian mata kuliah atau yang biasa disebut konversi di UIN Suka terjadi karena untuk menaikkan mutu. Hampir semua jurusan maupun prodi di setiap fakultas menerapkan konversi mata kuliah, maksimal lima tahun sekali. Salah satunya di jurusan KPI (Komunikasi Penyiaran Islam) dan PMI (Pengembangan Masyarakat Islam) Fakultas Dakwah.

Di jurusan PMI, sejak berdirinya pada tahun 1998, permasalahan yang selalu muncul mengenai konversi ini masih seputar perubahan mata kuliah secara mendadak. Mahasiswa cenderung kesulitan untuk mengambil atau mengulang mata kuliah yang sudah dikonversi. Dalam konversi, beberapa mata kuliah ada yang hilang dan digantikan dengan mata kuliah yang baru. Misalnya antara konversi kurikulum 2006 dan 2011, beberapa matakuliah yang hilang ialah Filsafat Ilmu, Bahasa Inggris II (bagian dua), dan Bahasa Inggris III (bagian tiga).

Bagi mahasiswa angkatan 2010 ke bawah, yang belum mengambil atau ingin mengulang mata kuliah tersebut, harus mengikuti matakuliah konversi yang telah ditetapkan dalam kurikulum 2011. Untuk matakuliah Filsafat Ilmu, dikonversi menjadi matakuliah Filsat Dakwah. Sedangkan untuk matakuliah Bahasa Inggris II dan III, dalam kurikulum 2011 dihilangkan atau dihapus. Bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan nilai pada kedua matakuliah ini, maka harus mengambil mata kuliah Komunikasi Massa.

Lain halnya yang terjadi pada konversi di Jurusan KPI. Tidak hanya pergantian dan penghapusan beberapa matakuliah, di Jurusan KPI juga terdapat beberapa

matakuliah yang berganti jumlah SKS-nya. Misalnya matakuliah Teori Komunikasi, yang pada kurikulum 2006 berjumlah 2 SKS menjadi 3 SKS pada kurikulum 2011.

“Konversi membuat mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah tersebut menjadi kesulitan dan membingungkan”

Sehingga bagi mahasiswa yang tercantum dua SKS dalam Kartu Rencana Studinya, jika ingin mengambil atau mengulang, harus mengikuti perkuliahan dengan jumlah tiga SKS.

Beberapa mahasiswa tidak menanggapi dengan positif konversi mata kuliah yang ada. Dias Senja, mahasiswa KPI semester sepuluh yang tidak setuju dengan adanya konversi mengatakan, hal tersebut tidak adil terhadap satu angkatan ke angkatan yang lain. “Konversi membuat mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah tersebut menjadi kesulitan dan membingungkan,” papar Dias.

Hal senada diungkapkan oleh Budi Agung Aditama, mahasiswa KPI semester delapan. Menurutnya, konversi memiliki tujuan yang baik karena sebenarnya konversi sebagai kemajuan Jurusan dan UIN Suka. Tetapi konversi juga membuat mahasiswa bingung, karena kesulitan saat

meninput dan harus memilih mata kuliah yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya.

Menanggapi hal ini Sekretaris Jurusan (Sekjur KPI) Saptoni menuturkan, konversi mata kuliah disebabkan tergantikannya kurikulum. Kurikulum tiap periode harus berganti maksimal lima tahun sekali. Bahkan mungkin juga dua atau tiga tahun sudah harus diganti. Pergantian kurikulum menurutnya perlu diadakan karena perkembangan. “Dulu lulusan dakwah (Fakultas Dakwah-red.) cuma menjadi penceramah atau penyuluh. Sekarang kita kembangkan di media massa sehingga konversi harus juga disesuaikan, yang dulu tidak ada sekarang diadakan,” ujar Saptoni.

Saptoni menambahkan, dalam hal pengambilan mata kuliah, angkatan 2010 yang masih semester enam akan ditawarkan mata kuliah sampai semester tujuh. Tidak mungkin membuka kelas khusus bagi mahasiswa angkatan 2010 ke bawah, karena jumlahnya yang tergolong sangat sedikit. “Apabila angkatan 2010 ada yang mau mengulang atau belum mengambil matakuliah tersebut (yang telah dikonversi-red.), apa mungkin kita akan memberikan kelas untuk mereka yang mungkin hanya lima atau enam orang? Sebelum konversi yang tahun 2011, mereka yang mengulang Bahasa Arab dan Bahasa Inggris masih bisa memperbaiki nilai di fakultas karena tiap semester ganjil kami membuka kelas. Tapi setelah konversi, ketika mereka akan mengulang mata kuliah yang telah dikonversikan, mereka harus mengambil mata kuliah yang menjadi mata kuliah pengganti sebelumnya,” katanya.

Sedangkan untuk menyalasi matakuliah yang jumlah SKS nya berganti, Jurusan memberikan kewenangan kepada dosen pengampu untuk mengatasi hal tersebut. Misalnya yang terjadi pada matakuliah Psikologi Komunikasi yang berubah bobot SKS nya dari dua SKS menjadi tiga SKS. Alimatul Qibtiyah, selaku dosen pengampu menambahkan materi tentang gender dalam kelasnya. “Materi tentang gender belum ada di KPI, sehingga saya rasa mahasiswa perlu untuk mendapatkan materi ini. Namun hal tersebut juga harus melalui izin dari

Jurusan,” ujar Alima, dosen yang juga aktif di PSW (Pusat Studi Wanita).

**“Dulu lulusan dakwah
(Fakultas Dakwak-red.)
cuma menjadi penceramah
atau penyuluh. Sekarang
kita kembangkan di media
massa sehingga konversi
harus juga disesuaikan,
yang dulu tidak ada
sekarang diadakan”**

Permasalahan Tenaga Pengajar

Selain berdampak pada mahasiswa, konversi juga menimbulkan permasalahan baru di kalangan tenaga pengajar. Hal ini terjadi karena setiap konversi matakuliah, seyogyanya harus disiapkan tenaga pengajar yang sesuai dengan bidang keilmuan mata kuliah baru tersebut.

Di UIN Suka sendiri, permasalahan tenaga pengajar setelah diadakannya konversi diatasi jurusan dengan tetap menggunakan dosen dalam yang ada terlebih dahulu. Jika memang dibutuhkan, baru akan diambil dosen dari luar. “Pertama-tama setelah membuat silabi dan menentukan materi yang akan diajarkan, kita tawarkan pada dosen yang bersangkutan apakah mampu mengajarkan materi yang kita tawarkan. Kalau memang tidak mampu kita cari dosen yang dari luar,” ungkap Saptioni.

Beberapa dosen juga menanggapi mengenai konversi mata kuliah tersebut. Nanang misalnya, dosen yang mengajar mata kuliah Hukum dan Etika Penyiaran dan Komunikasi Antar Budaya ini mengatakan, dalam workshop kurikulum, awal-awalnya kurikulum dibuat kemudian dosen menilai apakah meterinya terlalu berat atau tidak. “Untungnya saya sudah pernah berpengalaman mengajar mata kuliah tersebut. Untuk matakuliah Komunikasi Antar Budaya saya pernah mengajar di IAIN Sunan Ampel Surabaya,” kata dosen yang sebelumnya mengajar matakuliah Pengajar Ilmu Politik ini.[]



**STAY TUNE
on
107.7 RASIDA FM
the voice of students**

Visit & join us at
www.rasidaonline.blogspot.com

f Rasida FM t @RasidaFM

Lembaga Pers Mahasiswa **ARENA**

Sayembara Fotografi



**Rebut hadiah menarik
untuk tiga foto terpilih &
akan diterbitkan di SLiLiT ARENA
edisi Pasca Pemilu**

Tema Mahasiswa Peduli Pemilu

Syarat

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Ketentuan

- > Objek gambar; aktifitas PEMILWA 2013
- > File foto tipe jpg
- > Sertai foto *caption*

Pengiriman

Paling lambat tiga hari setelah PEMILWA,
sertakan biodata & no. ponsel
Kirim ke lpm_arena@yahoo.com

100 Mb Bikin Galau

Sejak akhir tahun 2011 semua mahasiswa dapat mengakses Internet un-limited di seluruh area kampus, namun awal Maret 2013 akses wifi dibatasi 100 Megabyte (Mb) perhari.

Oleh: Istikhana Nurul Huda



LPM ARENA/Lugas Subarkah

Berlakunya 100 Mb perhari karena UIN beberapa kali mendapat teguran dari jaringan internet Internasional terkait dengan penggunaan internet yang tidak bijak. Sebenarnya kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan cita-cita UIN menjadi kampus digital yang sudah dirancang sejak kepemimpinan Amin Abdullah saat transformasi IAIN menjadi UIN. Karena adanya pertimbangan pemutusan jaringan internet di seluruh UIN dengan jaringan internet Internasional maka keputusan itu terpaksa diberlakukan.

Kebijakan pembatasan kuota internet 100 Mb per hari untuk mahasiswa menyebabkan sebagian mahasiswa merasa resah. Kebijakan yang diterapkan tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu itu, membuat mahasiswa terkejut serta kecewa karena tidak dapat mengakses internet secara optimal.

Ida Pramadani mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) angkat bicara tentang kegelisahannya. "Dengan pembatasan kuota internet ini mahasiswa tidak dapat mengerjakan tugas dengan cepat, sekarang ini malah sering terjadi *trouble* di gerbang *wifi*, lalu kita tidak bisa berekspressi secara optimal, yang jelas pembatasan kuota ini bikin galau," katanya.

Begitu juga Latif mahasiswa D III Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (PII) mengungkapkan, selain bikin galau, 100 Mb juga meragukan. Karena mungkin itu kurang dari 100 Mb, sebab internet kecepatan maksimal 32 Kb. Sehingga apa yang kita akses terasa lebih singkat, cepat tidak sesuai dengan kuota yang ditentukan.

Khilmi mahasiswa Fakultas Adab mengatakan, pembatasan kuota ini ya meresahkan mahasiswa. "Kebetulan saya *ngekos* dekat dengan kampus, jadi di *kos* saya dapat mengakses *wifi* dari kampus, saya biasanya *download* drama Korea yang ukurannya sekitar 500 Mb. Jam-jam yang cepat untuk akses itu pagi-pagi dan Maghrib," kata Khilmi.

Agung Fatwanto, selaku kepala (PKSI) menjelaskan bahwa pembatasan tersebut karena UIN beberapa kali mendapat peringatan pengelola jaringan internet internasional. Ada beberapa *user* dari IP *address* UIN Sunan Kalijaga mengakses dan *download file-file* atau materi-materi digital secara ilegal. "Kalau kejadian itu terulang kita diberi peringatan IP *address* kita bisa di *drop out* (blok). Kalau diblok yang menjadi korban tidak hanya pelaku itu, walaupun itu segelintir orang tapi semuanya di tutup di seluruh UIN," kata Agung.

Selain itu, tambah Agung, koneksi

internet di UIN, kerap kali hanya digunakan untuk mengakses dan *download file* yang tidak terkait dengan kegiatan akademik, seperti *download software game* dan film. Sedangkan tugas utama PKSI untuk mengarahkan pengguna untuk tujuan akademik. Kebanyakan mahasiswa mengakses jejaring sosial seperti Facebook, E-mail, Twitter, dan YouTube. Untuk mendapatkan informasi berita terkini mereka lebih percaya dengan detik.com. "Karena ada acaman mau di blok semua. Kita harus melayani semua kepentingan umum jadi terpaksa hanya menyediakan 100 Mb per hari, jadi sebulan totalnya 3 Gigabyte (Gb)," ujarnya.

Dengan Pembatasan kouta seharusnya koneksi lancar. Tapi pada kenyataannya masih sering terjadi *trouble*. Namun Agung membantah hal tersebut "Terjadinya *trouble* itu tidak ada kaitannya dengan pembatasan kuota. "Terkadang Pengaksesnya terlalu banyak dan perlu *restart*. Kemarin ada gangguan tapi *nggak* dari kita, tapi dari sananya, penyedia layanan internet Internasional Lintas Antara (Lintasarta merupakan perusahaan penyedia layanan internet) kita ada kontrak dalam setahun itu penyedia itu minta dispensasi tujuh hari dalam satu tahun untuk *trouble*. kalau lebih dari tujuh hari kita berhak *komplain*". Katanya.

Agung menambahkan, pengguna koneksi internet di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, dihimbau untuk dapat menggunakan fasilitas ini dengan bijak. dan mendukung kegiatan akademik yang ada.

Namun ada juga mahasiswa yang merasa tidak terugikan terhadap kebijakan ini. Mira mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab mengatakan, "pembatasan internet 100 Mb itu menurut saya biasa aja, *nggak kenapa-napa*. Lah saya *nggak* pake *wifi*. Wong saya pake modem, di kampus aja saya kadang bawa modem sendiri kalau pake *wifi* kadang lama *loadingnya* padahal sinyal penuh". Katanya

Saat berita ini di turunkan kebijakan pembatasan kuota internet sudah berubah menjadi 100 Mb per enam jam.[]

Ke mana DPP Kita (?)

DPP adalah dana penunjang pendidikan, dari dan untuk Mahasiswa. Namun sayangnya, saat ini banyak dari mahasiswa yang tidak tahu apa itu DPP dan kemana saja dana tersebut dialirkan.

Oleh: Lugas Subarkah

“Tau sih DPP itu ada, tapi *nggak* tau buat apanya,” kata Saiful, Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Saintek semester VI. Ia juga mengakui bahwa tahu DPP karena ikut kegiatan di kampus. Lima mahasiswa dari fakultas yang berbeda yang ARENA wawancarai, semuanya menjawab tidak mengetahui apa itu DPP.

DPP (Dana Penunjang Pendidikan) adalah dana yang dibayarkan oleh mahasiswa pada Universitas. DPP hanya dibayarkan satu kali, yaitu saat calon mahasiswa hendak masuk perkuliahan semester satu sebesar Rp. 600.000,-. Untuk persebarannya, dana tersebut dibagi menjadi dua, untuk Universitas 20% dan untuk Fakultas 80%. “Pembagiannya untuk Fakultas dan Universitas 80%, 20% *mas*, sesuai SK Rektor,” ungkap Sri Haryani, Pembantu Dekan (PD) III Fakultas Dakwah. Kegunaan dari DPP sendiri berbeda-beda di setiap fakultas, tergantung kebijakannya masing-masing. Namun secara normatif, DPP itu kembali lagi untuk mahasiswa.

Di beberapa fakultas, DPP dialirkan ke BEM-F dan BEM-J. “Menurut saya kerja BEM itu kurang maksimal, kayak makrab dan segala macam itu kenapa harus bayar lagi? Terus DPP nya kemana?” komentar tersebut dilontarkan Andi, Mahasiswa jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester II. Menurutnya, dia belum begitu merasakan kegiatan-kegiatan dari BEM. Menurutnya, seminar-seminar yang dilakukannya menggunakan DPP cuma sekedar formalitas. Ia juga menghimbau pada mahasiswa untuk turut mengawasi aliran uang di kampus kita. “Walaupun secara manusiawi kita ini *udah* paling murah bayarnya, tapi ya kita *tetep* harus mengawasi lah, *toh* itu uang kita juga,” tambahnya menutup perbincangan.

Di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dana DPP dipakai untuk beberapa program. Pertama, Pengembangan Karakter dan Tahsinul Qur'an (PKTQ), yaitu kegiatan yang bergerak dibidang keagamaan, seperti baca-tulis al-Qur'an dan sebagainya. Kedua, Bakat-minat, bergerak di beberapa bidang seperti olahraga, dan penelitian. Ketiga, program bahasa, mencakup pelatihan bahasa Inggris dan Arab. Keempat, program Teknik Informasi dan Komunikasi, yaitu



LPM ARENA/Lugas Subarkah

pelatihan komputer dan IT. Program-program tersebut tidak bersifat wajib bagi mahasiswa, kecuali PKTQ. Sertifikat PKTQ digunakan sebagai syarat mengikuti Program Pengalaman Lapangan.

“Kalau dikatakan wajib atau tidak, terserah mahasiswa. *Wong* itu fasilitas untuk mahasiswa *kok*. Jadi DPP fakultas ini kan memfasilitasi, silakan bagi yang ingin ikut,” jelas Sabarudin, PD III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ia berpendapat bahwa program-program tersebut adalah fasilitas yang diberikan fakultas pada mahasiswa yang asalnya dari uang mahasiswa. sehingga jika tidak dimanfaatkan, mahasiswa sendiri yang akan rugi. “Tidak mungkin diwajibkan semua *to mas*, kegiatan mahasiswa kan sudah cukup padat, nanti takutnya malah membebani.”

Irfan, Mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester IV, mengaku dulu mengikuti kegiatan PKTQ. “Kalau masalah sosialisasi sudah bagus, biasanya diumumkan di papan pengumuman atau di kelas,”katanya. Menurut Irfan, secara umum kegiatannya sudah berjalan dengan baik. Hanya saja kurang menjurus. “Seolah-olah kita belajar PKTQ hanya sebagai syarat PPL niatnya, bukan untuk mendalami,” ungkap Irfan.

Tidak jauh berbeda, Fakultas Saintek mengalirkan DPP nya untuk program khusus yang dilaksanakan rutin. Adapun program tersebut yaitu Bahasa Arab, Bahasa Inggris, Seni, Jurnalistik, dan Forum Kajian

Islam (FKIS). Selain lima bagian otonomi fakultas tersebut, DPP juga dialirkan untuk delegasi mahasiswa, seminar, pengembangan olimpiade, dan kunjungan akademik mahasiswa. “Dalam kunjungan akademik kita cuma *ngasih* dana stimulan *aja*, tidak *full*, karena akan terlalu banyak nanti,” ungkap Murtono, PD III Fakultas Saintek.

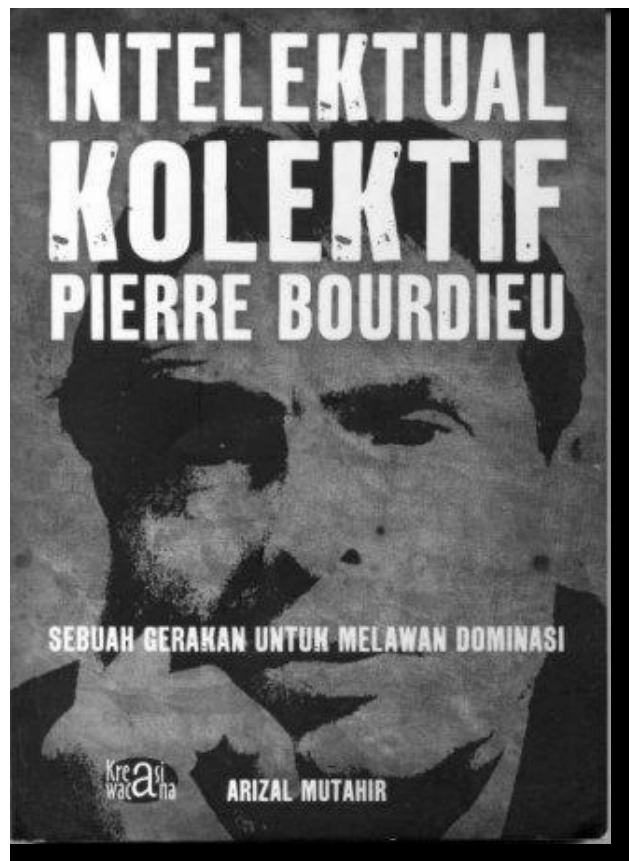
Saiful mengaku sedikit kecewa dengan pembagian DPP yang menurutnya masih kurang merata. “Saya harap lebih merata saja pembagian DPP nya, jangan cuma karena di kegiatan tersebut *nggak* ada anak BEM, terus *mencuit* jatahnya.”

Berbeda halnya dengan DPP di Fakultas Adab dan Budaya, di fakultas ini DPP digunakan untuk berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM-F dan BEM-J, seperti Pekan Budaya yang diadakan rutin setiap tahun, pelatihan-pelatihan, dan seminar. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, DPP digunakan juga untuk sumbangan sosial bagi mahasiswa yang tertimpa musibah, apresiasi mahasiswa yang menulis di media masa atau mahasiswa berprestasi, dan membeli beberapa peralatan seperti alat-alat musik, LCD, dan lainnya. Sebagian alokasi dana DPP digabung dengan SPP untuk membeli peralatan-peralatan tersebut. “Mahasiswa boleh *makai* studio musik, yang penting izin, dan atas nama mahasiswa Fakultas Adab,” kata Fatah, PD III Fakultas Adab dan Budaya.

Di Fakultas Dakwah, DPP digunakan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan BEM-F dan BEM-J, seperti *outbond*, seminar, dan pelatihan-pelatihan. BEM bertugas sebagai pelaksana, sedangkan pengawasnya adalah dekanat dan jurusan. Perencanaannya sendiri sesuai SK Rektor, telah dibuat tim perencana yang terdiri dari Dekan, PD I, Ketua BEM, dan Ketua Jurusan. Jika DPP tidak cukup, akan ditambah dengan SPP. “Kan kita mungkin merencanakan banyak kegiatan, tapi saat pelaksanaan jika dananya kurang, kita *tambahi* dari SPP,” ungkap Sri Haryani.[]

Terdakwa Pembebasan Intelektual

Oleh: Ulufun Na'imah



Memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, belajar dari kecil hingga perguruan tinggi, intelektual bukanlah sekedar itu. Intelektual juga bukan orang yang hanya diam saja melihat dan berkomentar mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Intelektual saat ini kebanyakan bekerja di bawah kekuasaan politik dan ekonomi. Namun tidak selamanya mereka bekerja di bawahnya, sesekali mereka adalah pelaku politik dan ekonomi itu sendiri. Intelektual bermanfaat bagi masyarakat jika mereka dapat menggunakan ilmu-ilmunya dan mengabdikan pada masyarakat. Sebaliknya, mereka juga dapat merugikan masyarakat saat mereka menutupi apa yang seharusnya diketahui masyarakat dan menggunakannya untuk memperdaya masyarakat demi kepentingannya sendiri.

Buku ini menjelaskan konsep-konsep pemikiran Bourdieu tentang intelektual beserta hal-hal yang mendasari

pemikirannya. Untuk lebih mudah memahami pemikirannya, diungkapkan pula biografi kehidupannya. Beliau sendiri adalah seorang sosiolog Prancis yang sering melakukan aksi-aksi dan demonstrasi, sesuai teori yang ia kemukakan sendiri yaitu intelektual berperan mendukung kaum yang terdominasi. Oleh karenanya, dia disebut sebagai “sosialis teroris”, “diktator intelektual”, “pemimpin pemujaan”, “guru”, dan “nabi”. Pada beberapa kalangan yang memujanya, dia bahkan dianggap sebagai “dewa”.

Intelektual mempunyai batasan-batasan tersendiri untuk berdiri sebagai intelektual itu sendiri dan menjalankan perannya untuk membela kaum yang tertindas. Agen pengetahuan yang netral, tidak terkoyak oleh pengaruh politik maupun ekonomi, kini otonomi intelektual telah keluar dari batasnya. Namun, tidak

salah jika intelektual juga ikut berkecimpung dalam bidang politik, ekonomi atau bidang lainnya dan dapat mentransfer ilmunya. Setiap pekerjaan yang kita lakukan tentulah ada ilmunya yang menjadikannya baik dan bermanfaat.

Penulis memandang bahwa intelektual harus tetap pada tempatnya, tidak tercampur oleh hal-hal lain. Untuk mewujudkannya, ditawarkan satu solusi, yaitu intelektual kolektif. Para intelektual yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing bersatu dan saling berhubungan, mendukung dan bersinergi untuk menjalankan perannya. Intelektual yang dikehendaki penulis ini mengacu pada kategori intelektual awam (*public intellectual*). Mereka berjuang dengan kemampuan intelektualnya untuk kepentingan masyarakat luas, khususnya golongan-golongan atau pihak-pihak yang lemah, terpinggir, tidak mempunyai kuasa, daif dan atau ditindas. Sedangkan selain intelektual awam, ada intelektual establishment dan

intelektual atas pagar. Intelektual establishment menggunakan ilmu pengetahuan dan daya intelektualnya untuk membantu/menyokong pihak-pihak yang kuat, berkuasa dan berpengaruh. Intelektual atas pagar menonjolkan diri dan menyokong pihak ketika suasana mengikut kesesuaian dirinya, tanpa pendirian yang tetap dan jelas.

Mahasiswa termasuk intelektual yang memiliki peran penting dalam menjalankan perannya. Mereka yang akan mengembalikan peran intelektual ke tempatnya. Peran intelektual yang dilakukan mahasiswa telah sering kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan media. Kita telah sering melihat aksi-aksi dan demonstrasi mahasiswa yang melawan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat. Hal itu menjadi tidak baik saat aksi atau demonstrasi dilakukan dengan cara yang tidak benar yang justru merugikan masyarakat yang seharusnya mereka bela. Namun banyak pula intelektual yang mendukung suatu pihak tertentu sehingga mendapat tentangan dari masyarakat banyak termasuk di dalamnya mahasiswa.

Buku ini sangat *recommended* bagi para mahasiswa sebagai bagian penting dari pembebasan intelektual. Buku ini menjadi refleksi diri kita sebagai intelektual untuk menjalankan peran yang diemban. Penulis mampu mengungkapkan dengan cukup jelas bahasa Pierre Bourdieu yang terkenal sulit dipahami. Walaupun penulis dapat menjelaskan ide-ide Pierre Bourdieu dengan gamblang, tetap saja ada bagian-bagian yang masih belum jelas konsepnya. Banyaknya istilah-istilah yang jarang digunakan menjadikan ulasan yang dibahas kurang dapat ditangkap dan dimengerti sehingga apa yang dimaksudkan oleh penulis tak tersampaikan.[]

Spesifikasi Buku

Judul Buku	: Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu: Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi
Penulis	: Arizal Mutahir
Penerbit	: Kreasi Wacana
Terbit	: Pertama, Januari 2011
Tebal	: X + 222 hlm



Demokrasi Tanpa Kesejahteraan

Oleh: Nur Sholikhin*

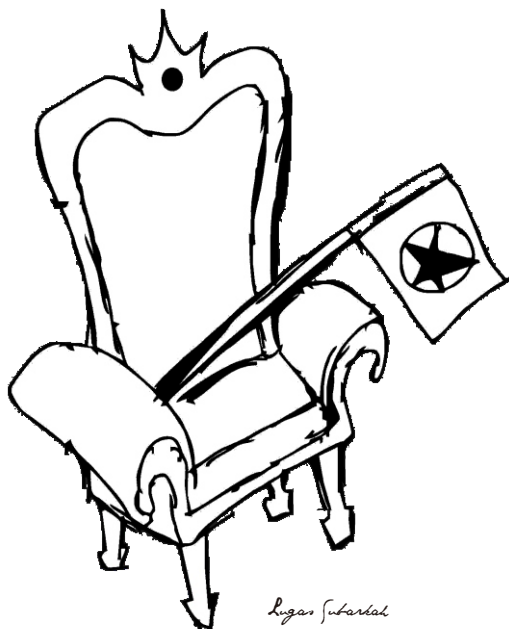
“Tidak ada demokrasi tanpa politik, tidak ada politik tanpa partai, dan tidak ada partai tanpa kompromi.” Demikianlah ungkapan dari ilmuwan politik Clinton Rossiter. Dari statemen tersebut membuktikan betapa pentingnya peran partai politik (Parpol) dalam demokrasi. Lewat proses politik di parlemen, parpol dapat menentukan orang-orang yang duduk memimpin di berbagai lembaga, baik tingkat daerah ataupun negara.

Tujuan utama di bentuknya pemerintahan tidak lain karena untuk melayani, melindungi, dan menyejahterakan rakyat. Lewat mekanisme demokrasi, pemerintahan terbentuk melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun, rakyat tidak melaksanakan kedaulatan langsung, akan tetapi rakyat mewakilkan kedaulatan nya kepada para pejabat pemerintah atau wakil-wakil rakyat. Kedaulatan yang diwakilkan di sini bukan berarti rakyat hanya memilih calon-calon pemimpin atau pejabat-pejabat pemerintah saja. Akan tetapi, rakyat berhak mengutarakan pendapatnya dengan bebas, demi kesejahteraan nya.

Seperti yang digambarkan oleh Emha Ainun Najib (Cak Nun), bahwa pemerintah adalah abdi atau kawulo yang dilantik oleh otoritas kepemimpinan yaitu rakyat. Dan diberi tugas untuk memenuhi amanat rakyat, di beri upah fasilitas dan berbagai akses untuk mempermudah pekerjaannya dalam menyejahterakan rakyat. Hal ini juga digambarkan dalam falsafah Jawa, berupa nyanyian “Gundul-gundul pacol”. Pemerintah meletakkan *bakul* (kesejahteraan rakyat) di atas kepalanya. Pemerintah dilarang untuk “*gembeengan*” (main-main terhadap tugasnya). Jika pemerintah “*gembelengan*” maka *wakul ngglimpang segane dad isak latar*. Kekayaan negara ataupun rakyat tercecer dikuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena pemerintah merasa kekuasaan tertinggi adalah miliknya, mereka pun lupa hakikat demokrasi.

Memotret Demokrasi Kampus

Sebagai penganut sistem pemerintahan demokrasi, para aktivis partai kampus UIN Sunan Kalijaga sibuk menyiapkan pemilwa,



berbagai strategi telah disiapkan agar dapat memenangkan pemilihan presiden mahasiswa ataupun wakil mahasiswa. Yang menjadi pertanyaan sebagai mahasiswa awam, apa yang dilakukan oleh para aktivis kampus tersebut setelah menduduki kekuasaan?

Sebagai pelajar bahkan orang awam terhadap politik, pastinya tahu apa itu demokrasi. Untuk apa sistem demokrasi diimplementasikan dalam kehidupan bernegara. Tidak lain sistem demokrasi untuk menyejahterakan dan menampung aspirasi rakyatnya. Dalam ranah kampus, rakyat merupakan warga kampus yaitu mahasiswa. Namun, apakah selama ini mahasiswa yang menjabat sebagai pemerintahan telah menyejahterakan rakyatnya? Kesejahteraan di ranah mahasiswa bukan berarti sejahtera dalam menempuh kehidupan akan tetapi sejahtera dalam intelektual dan haknya sebagai mahasiswa.

Kebanyakan mahasiswa apalagi mahasiswa akademik tidak merasakan hadirnya pemerintahan mahasiswa yang telah dibentuk melalui sistem demokrasi. Kesejahteraan hanya dimiliki oleh kelompok yang memenangkan pemilwa. Hal ini timbul karena adanya kompetisi dalam memenangkan pemilwa tersebut. Seakan-akan selain dari partai politiknya adalah musuhnya. Sehingga ketika terpilih memenangkan pemilihan mahasiswa, kelompoknya yang akan di sejahterakan. Hal semacam ini tidak selayaknya terjadi

dalam sistem demokrasi. Demokrasi mengajarkan bahwa pejabat pemerintahan adalah pembantu rakyat baik itu dari golongan manapun.

Apa gunanya mengimplementasikan sistem demokrasi jika kesejahteraan tidak milik semua rakyat. Hal itu selayaknya menjadi renungan bagi semua mahasiswa. Jika dalam pemerintahan mahasiswa tidak bisa mengayomi semua rakyatnya. Maka nasib bangsa ke depan tidak jauh dari kehidupan di kampus, yaitu hanya mementingkan kelompok dalam menjalankan roda pemerintahan.

Keinginan untuk mendominasi merupakan salah satu bentuk dari politik. Sehingga tidak bisa dielakkan kebanyakan partai politik jika sudah menduduki kursi pemerintahan lebih banyak mementingkan kelompoknya dari pada kepentingan rakyat banyak. Hal ini seharusnya dihilangkan ketika salah satu partai politik sudah menduduki kursi pemerintahan. Hasrat untuk mendominasi itu layak jika di lakukan ketika sebelum melakukan pemilihan wakil mahasiswa. Namun, hasrat tersebut harus dihilangkan ketika salah satu partai politik sudah menduduki kursi pemerintahan.

Pemerintah merupakan milik semua rakyat, bukan hanya satu kelompok. Sehingga pemerintah juga harus memperhatikan semua rakyatnya. Karena mereka bukan lagi mewakili dari partainya, tetapi mewakili dari semua mahasiswa dari golongan apapun. Jika demokrasi dijalankan dengan baik di pemerintahan mahasiswa, maka nasib bangsa ke depan akan lebih baik dari sekarang ini. karena demokrasi dewasa ini hanya dijadikan alat untuk memperebutkan kekuasaan. Setelah mendapatkan kekuasaan, kebanyakan para pejabat pemerintah lalai dengan tugasnya untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.[]

***Penulis ialah mahasiswa semester empat Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saat ini aktif di Majalah Bangkit Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama DIY.**

Sepeda Keranjang Sri Tanjung

Oleh: Mawaidi D. Mas

Tersiarlah kabar di Pasar Kotagede tentang munculnya Sri Tanjung. Orang-orang akan mengerutkan dahi dan ingatannya akan menjalar pada sebuah cerita rakyat dari Tanah Banyuwangi. Barangkali pula orang-orang merasa diingatkan pada kisah perempuan cantik itu yang terjadi di zaman Kerajaan Sokakencana di masa pemerintahan Raja Hadiwisesa.

Mustahil jika berita seputar Sri Tanjung di Kotagede merupakan bualan orang-orang Jogja yang sedang mementaskan drama. Sri Tanjung yang cantik jelita benar-benar ada di Kotagede. Ini bukan permainan yang sedang ditunjukkan oleh Sultan Hamengku Buwono X kepada rakyatnya. Atau berita itu bukanlah isu licik yang sedang direkayasa masyarakat Kotagede agar desa itu menjadi masyhur ke muka luhur.

Aku berasal dari daerah sebelah yang berdekatan dengan Jogja; Magelang. Dan aku menginjak tanah istana ini baru dua hari. Kini aku tinggal di rumah Kiai Bakakowi sebagai tamunya.

Mengingat berita Sri Tanjung, setelah kuperhatikan Kiai Bakakowi mulanya tidak terlalu merespon isu yang menggetarkan masyarakat Kotagede dan sekitarnya. Entah, belakangan ini aku melihat gelagatnya yang resah dan seperti ingin tahu berita itu. Terlalu janggal kiranya jika aku menawarkan kepada beliau untuk melihat langsung ke tempat kejadian. Aku adalah mantunya. Sebagai menantu aku harus menjaga etika kepada beliau, abah Laila Al Ithriyyah. Laila, putri sulung beliau adalah tunanganku.

Mulanya, datang ke Jogja dalam rangka silaturahmi. Seiring punya waktu luang dan kebetulan Laila sedang pulang dari Jombang (tempat ia mondok di sebuah pesantren) maka kusempatkan berlama-lama di kediamannya sembari menghabiskan liburan kuliah. Di sini, kami mempunyai kesepakatan untuk

bertemu untuk yang pertama kalinya perihal muwajjahah sebagai calon suami-istri.

Suasana ndalem tidak terlalu ramai di tengah kabar Sri Tanjung di Kotagede. Begitu pula di kalangan santri putra, tak ada desas-desus seputar Sri Tanjung di Kotagede. Jangan-jangan, hanya kaum laki-laki saja yang tidak terlalu penting dengan adanya isu itu, pikirku. Barangkali saja, kehadiran Sri Tanjung di kalangan santriwati justru lebih geger. Setiap hari Kotagede selalu dikunjungi para santriwati yang hendak belanja. Tak mungkin.

Aku menyempatkan diri keluar kompleks pesantren untuk membeli koran. Kabar Sri Tanjung benar-benar diliput. Aku memantapkan niat membaca headline koran Lempuyangan Post yang bertajuk SRI TANJUNG MENJUAL MARTABAK. Makin penasaran aku mendapati judul liputan berita yang terpacak itu.

Kueja kata per kata dari kalimat yang tertulis di koran, aku tidak ingin salah memahami kejadian aneh tersebut. Liputan yang tidak menyertakan gambar Sri Tanjung cukup banyak memakan halaman. Aku terus memahami isi berita bahwa Sri Tanjung menjual martabak. Memang benar! Dalam berita yang kubaca itu Sri Tanjung menjual martabak di Pasar Kotagede. Namun, wartawan yang menulis berita menginisialkan perempuan yang dimaksud Sri Tanjung.

Selain kabar sesungguhnya Sri Tanjung dengan kecantikannya yang membuat laki-laki terpesona, Sri Tanjung telah banyak merugikan penjual martabak lain, begitu isi penggalan berita yang kudapat. Salah seorang penjual martabak mengaku, Sri Tanjung adalah penjual baru di Pasar Kotagede. Ada juga yang berpendapat perempuan yang dimaksud Sri Tanjung itu memakai pelet atau susuk untuk melariskan martabaknya. Sebagian penjual di Pasar Kotagede mendukung

untuk menggugat Sri Tanjung dan sebagian pula yang menolak. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa ketika mengetahui spekulasi itu. Ketika ditanyai oleh wartawan dalam berita itu, polisi yang melihat Sri Tanjung hanya tertawa. Selain itu, akunya salah seorang polisi, perempuan tersebut memang cantik dan mirip Sri Tanjung.

Sayang sekali. Reportase yang ditulis wartawan itu tidak mendeskripsikan ciri perempuan yang dimaksud Sri Tanjung. Ini sungguh aneh! Kepalaku menggeleng berulang kali. Menggaruk-garuk kepala. Apakah baru kali ini Jogja kedatangan makhluk perempuan cantik serupa Sri Tanjung?

"Jangan-jangan, perempuan itu Nyai Roro Kidul?" Pikirku sejenak.

Di ndalem, aku menceritakan kronologi mengenai Sri Tanjung di Pasar Kotagede yang menggegerkan Jogja. Kulihat mertuaku itu, abah Laila dan ibu Laila sedang duduk di kursi sofa. Laila tidak ada, barangkali dia sedang ngaji atau ada di asrama putri. Aku di hadapannya (di kursi yang lain) sudah direstui untuk menceritakan berita itu.

Suatu malam—aku, abah Laila dan salah seorang pengurus ndalem berziarah ke Makam Mataram yang kebetulan terletak di sebelah selatan Pasar Kotagede. Dari arah utara sambil mobil melaju pelan aku berharap perempuan penjual martabak yang dimaksud Sri Tanjung masih ada. Rasa penasaran terhadap Sri Tanjung masih mengusik pikiranku. Kecantikan seperti apakah yang dimiliki perempuan itu?

"Astaghfirullah. Aku sudah punya Laila."

Kali ini satu tujuan dari rasa ingin tahu wajah perempuan penjual martabak yang bikin geger masyarakat. Sebagian penjual martabak yang lain pun berprasangka kalau perempuan itu memakai pelet untuk menyaingi penjual martabak yang lain.



Malam di Kotagede dengan lampu-lampu terang di pinggir jalan sepertinya biasa-biasa saja. Kuedarkan pandang dari dalam mobil tampak

kerumunan orang-orang yang menjual pakaian dikerumuni pembeli. Itu saja. Selebihnya kumpulan tukang becak memarkir becaknya di kiri-kanan jalan. Timbul di benakku berita itu hanya bualan belaka. Sekumpulan penjual martabak memang benar-benar ada. Ternyata hanya rombongan yang diparkir, penjualnya tidak ada. Sama sekali tidak ada orang di sana.

Bila malam di Kotagede penjual martabak pulang bakda maghrib tadi. Kata abdi ndalem yang duduk di belakangku, segala aktivitas di Pasar Kotagede dimulai dari pagi hingga pukul sembilan malam. Berbeda dengan penjual martabak, waktunya hanya dari sore hingga bakda maghrib saja. Tertanggal sudah keinginanku untuk melihat paras kecantikan Sri Tanjung.

Usai ziarah kami pulang melewati jalan yang pertama kali kami lalui. Suasana mulai sepi pada pukul sembilan ke atas. Di pinggir jalan tukang becak terlihat mengantuk-ngantuk, dan lainnya sudah terlelap di atas becak.

Kecantikan Sri Tanjung kembali membuat geger Kotagede. Pagi yang mengembun, kabarnya Sri Tanjung sedang belanja di Pasar Kotagede. Dari arah Gedungkuning, orang-orang yang hendak ke Giwangan menyempatkan diri

mampir ke Pasar Kotagede demi melihat perempuan yang dijuluki Sri Tanjung. Akhirnya, polisi turun tangan mengatur lalu lintas yang padat. Kabar Sri Tanjung semakin tenar. Kawanan reporter infotainment sebuah stasiun televisi tidak bisa melalui jejalan orang-orang sepanjang jalan Kotagede.

Kotagede mulai siang. Orang-orang masih berjubel memenuhi Pasar Kotagede yang bising di antara motor dan mobil yang juga meraung-raung. Di sisi lain, Sri Tanjung yang mereka incar sudah tidak ada di tempat. Sebagian orang antara percaya dan tidak percaya bahwa Sri Tanjung sudah pergi dengan sepeda keranjangnya.

Rasa penasaran makin mencuat serupa tanduk api di kepalaku. Seorang loper koran yang baru saja memberi tahu perihal Sri Tanjung sedang belanja di pasar, juga geleng-geleng kepala. Koran hari itu tidak menayangkan berita Sri Tanjung lagi. Tidak hanya satu koran yang aku cek. Dari koran satu ke koran Jogja lainnya tak ada yang menuliskan berita seputar Sri Tanjung.

"Bapak tahu Sri Tanjung itu siapa?"

"Wah, saya kurang tahu ya, Mas. Katanya sih, perempuan yang disebut-sebut Sri Tanjung itu, biasa-biasa saja menerima julukan itu."

"Aneh," kataku sambil membuang pandang.

"Mas pendatang ya?"

"Iya, Pak."

"Pantesan. Tinggal di mana sekarang?"

"Di kediaman Kiai Baka."

"Wah, tamu istimewa berarti."

Kami tertawa. Beberapa kali kubolak-balik koran yang satu ke koran lainnya. Tetap saja halaman yang kutemui tidak ada berita mengenai Sri Tanjung. Aku hendak ke Pasar Kotagede untuk melihat langsung Sri Tanjung tanpa Kiai Baka tahu, tanpa Laila tahu. Sepertinya, tidak enak hati jika aku keluar pesantren apalagi sampai jauh ke pasar. Kalau saja aku pamit, sama saja berbuat culas. Keinginanku hanya akan membuat beliau kecewa.

Kembali aku ke ndalem. Abah Laila menyambutku ketika memasuki ruang tengah. Beliau berkata, nanti sore akan

mengajakku meos (pergi) ke Kediri dalam rangka halal bihalal. Beliau juga berpesan kalau aku disuruh ikut untuk mewakili para santri.

Tiga hari di Jogja, kabar tentang Sri Tanjung hanya akan kudengar dalam berita dan cerita. Ke Kediri membutuhkan waktu yang lama, minimal tiga hari di sana. Nanti sore berangkat, besok pagi tiba di sana. Dan lusanya baru akan balik ke Yogyakarta.

Tak ada waktu untuk ke Pasar Kotagede. Tak ada alasan rasional untuk melihat Sri Tanjung. Hari sudah sore dan semua persiapan sudah dimasukkan ke mobil. Aku menerawang langit Jogja yang cerah. Ke Jogja, aku ingin sekali bertemu Laila, tunanganku, calon istriku. Selalu ada saja halangan untuk berdua, halangan semisal kisruhnya Sri Tanjung. Banyak waktu hanya melalui SMS. Dan itulah yang membuatku rindu. Sementara aku tidak mungkin meminta abah agar aku dipertemukan dengan dia.

Di dalam mobil, mesin sudah dinyalakan untuk menuju gerbang. Ku sempatkan mengirim pesan kepada Laila bahwa aku ikut abah ke Kediri. Kuucapkan pula rasa rindu ingin bertemu yang selalu gagal. Aku lega. Abah sudah di sampingku dan segera kulajukan mobil melewati pintu gerbang. Tiba-tiba ada pesan balasan dari Laila:

"Wa'alaikum salam. Hati-hati dan jaga dirimu baik-baik, Sayang. Kalau boleh kamu tahu, nanti sore aku jualan martabak di Pasar Kotagede. Ssst..., jangan kasih tahu abah. Hanya kamu yang tahu dan ibu."

Laila menjual martabak di Pasar Kotagede? Tubuhku menggigil. Di samping garasi, kulihat sebuah sepeda keranjang warna hijau. Terbayang Sri Tanjung dan tunanganku Laila.

Yogyakarta, 7 Juni 2012

kutulis di sela-sela lagi sendirian.

Biodata:

Mawaidi D. Mas, bekerja sebagai Redaksi LPPM Kreativa, FBS-UNY. Aktif di Kajian Rabo Sore dan Garawiksa Institute.

Hitam Berwarna

Oleh : Angin Desa

Langit kian merona saat senja sayup memperdengarkan
alunan-Nya
Hitam... kelam gelap...hati yang serasa mati,,,
Langkah yang kian melemah namun telah jauh menuntun
kesesatanku
Rapuh diriku nyatanya,
Wahai Yang Maha Menerima Maaf
Air mata ini nyata mengalir dan *tak* akan palsu
menipu-Mu
Tapi hati ini tak memiliki akar yang kuat
Hanya sehempas merdu angin menampar menerpa
Luluh lantah sudah apa yang mereka bilang iman
Ke mana Tuhan...
Di mana?
Jalan kembali ini terlalu banyak tikungan
Haruskah kulewati semua jalan yang berliku
Berdalih sebagai proses pendewasaan
Andai cahaya-Mu *tak* pernah datang menerangi,
Tak kan ku rindu sayu hangat ketenangan batin
Kalut sudah akal ini dikepeng dosa
Kuberteriak saat mulut ini rapat membisu
Maaf Tuhan,
Karna amnesia melandaku saat dunia berikan hidup berwarna
Maaf Tuhan,
Karna hanya saat hati hujan insomnia membekukan dunia
Ini aku, yang begitu merindukan kemurnian sujudku
Merindu Engkau kekasih setia semua makhluk
Tersungkur lebam remuk raga dan jiwa
Untuk Engkau Sang Maha Penyejuk Jiwa

I am, the Heart

Oleh : Mh Nuda

Here, I am with uncertain
All movement of mine is unclear
Who knows is went
Certainly yes, any one ain't care
Barren soul is more and more
Loneliness of itself never passes away
Its sadness sounds more
And, its will's only such a firefly
Oh she, my heart
Loud always sounds
Angry above lions
Cruel on the earth
Sees me
Barks
Beats
On me
I am wrong way
Correspondingly lose
Heart's never given away
For it, the way to lose

???

Oleh : Dia Nova

walau kau pergi..... walau kau jauh
aku tak akan berubah
walau sakit lagi walau menangis lagi
aku tak akan peduli..
walau kau terus berjalan... walau kau tak pernah memandang aku tak
akan berhenti
jika kau diam... jika kau melihatku dan menegurku bodoh
aku tak akan pergi

sakit lagi dan menangis lagi
tapi aku hanya ingin lagi..
pergi lagi lalu kembali aku tetap disini...

mungkin aku bodoh
bisa saja aku gila
tapi aku hanya ingin lagi
sebut saja aku gila
sebut saja aku terlalu bodoh
atau kau mau bilang aku keras kepala..

tapi bagaimana jika aku tak denganmu??
aku tak akan rasakan kesendirian jika aku tak denganmu
aku tak akan sakit dan menganis karenamu
aku tak akan berharap untuk selalu dipandang
untuk sedikit saja dianggap jika bukan kau
aku hanya akan bahagia jika itu bukan kau...

kau masih akan pergi?
kau tetap tak sadari?

aku hanya ingin denganmu
walau hanya sekali
sekejap... tak selamanya

cobalah sejenak kau duduk disampingku
sejenak kau sandarkan tubuhmu padaku...
apa kau lelah?? apa kau jenuh?? atau sedang sedih??
kau boleh tertidur disampingku saat kau lelah..
kau boleh mendengarkan ceritaku saat kau jenuh
dan kau boleh menangis saat kau sedih...
bisa saja kau bercerita dan akan ku dengarkan...

cobalah kau pahami butanya orang yang telah jatuh cinta...

FTK Buka Jurusan Baru

Setelah mengganti KI dengan MPI, FTK resmi membuka jurusan PGRA pada tahun ajaran 2013/2014

Oleh: Khusni Hajar

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, yang harus ditanamkan sedini mungkin kepada setiap anak. Di Indonesia pemerintah sudah menetapkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 14 yang menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan Paud jalur Pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA).

Hal itulah yang mendasari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga membuka jurusan baru, yakni Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), yang dibuka pada ajaran 2013/2014. PGRA ini sebenarnya sudah diusulkan oleh FTK sejak tahun 2009, namun saat itu dari Kementerian Agama (Kemenag) belum membuka jurusan PGRA, sehingga FTK mengurungkan usulan tersebut. Pada tahun 2011 FTK mengusulkan kembali hal tersebut dan pada pertengahan tahun 2012 kemarin keluar izin operasional untuk PGRA.

Selain tuntutan Undang-Undang, Prof. Dr. Sukiman, Pembantu Bidang Akademik

FTK mengungkapkan, kebutuhan di masyarakat dan juga amanah yang diemban oleh FTK untuk menjadi Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) juga menjadi landasan FTK untuk membuka jurusan PGRA. "LPTK ini diberi tugas pemerintah untuk mensertifikasi guru, didalamnya guru RA yang bernaung di Kemenag, padahal syarat untuk mensertifikasi itu harus ada prodi yang bersangkutan, tetapi selama ini kita belum ada. Maka kita mengusulkan untuk membuka jurusan tersebut dan FTK terpanggil untuk mencetak tenaga pendidik profesional," tambahnya.

Dalam persiapannya, Sukiman juga menyatakan bahwa pihaknya saat ini dalam tahap pemantapan desain kurikulum, dimana kurikulum untuk PGRA sudah dirancang sejak tahun 2009. FTK juga sudah mengangkat Ketua Program Studi (Kaprodi) PGRA, yaitu Dr. H. Sumedi. Namun sampai saat ini belum menunjuk sekretaris prodi. Selain itu, FTK sudah menetapkan 10 dosen di PGRA, dan masih merekrut dosen, baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun Non PNS untuk memenuhi kebutuhan jangka waktu terdekat.

Untuk awal tahun ini, fakultas hanya membuka 1 kelas untuk jurusan PGRA, sekitar terdapat 40 kursi mahasiswa. Dalam membuka jurusan tersebut, fakultas membuat kebijakan baru, yakni mengurangi kelas jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), yang semula menerima 6 kelas

menjadi 4 atau 5 kelas.

Menanggapi kebijaksanaan tersebut, Salistya Muniroh, mahasiswi PAI menyatakan ia sangat setuju dengan pengurangan kelas PAI, karena selama ini menurutnya PAI terlalu banyak kelas, semakin membludak, dan tidak efisien. "Ada enam kelas, perkelas ada 50 mahasiswa, bahkan ada juga yang 55". Mahasiswi yang sekarang mengajar di PAUD Rumah Balita Cerdas Bantul ini juga setuju dengan FTK membuka Jurusan PGRA, karena selama ini guru yang mengajar di PAUD/RA banyak yang bukan berasal dari jurusan mereka ketika kuliah.

Susi, pengajar RA Dewan Persatuan Wanita (DWP) UIN Sunan Kalijaga, menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dan peran guru sangat penting dalam perkembangan anak, karena usia dini merupakan masa keemasan untuk anak dalam mereka segala hal. Guru sangat berperan penting dalam mengarah dan mendidik anak di sekolah.

Kaprodi PGRA, Sumedi mengharapkan, lulusan RA bisa menjadi pencerah bagi masyarakat. Bisa mengaktualisasikan potensi-potensi potensi peserta didik, menjadi pendidik yang santun, bijaksana, dan juga tidak melakukan kekerasan. "Artinya tidak memberikan beban yang berat kepada peserta didik, bukan kekerasan dalam arti fisik," tutur dosen PAI ini.[]

Keluarga Besar LPM ARENA

Mengucapkan Selamat dan Sukses atas Wisuda

Ulfatun Ni'mah
Pemimpin Umum 2010/2012





Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik Dan Empirik*

Oleh: Lilik Sulistyawati

Buku ini menjelaskan sistem politik di Indonesia yang tidak semata-mata hanya bersifat teoritis namun juga secara empirik. Artinya dalam pembahasannya diberikan pula ulasan yang disesuaikan dengan konteks dimana sistem politik itu pernah diberlakukan di Indonesia, yakni masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

Bab pertama dalam buku ini berisi pembahasan sistem politik dalam suatu kerangka analisis. Menurut buku ini, pendekatan sistem berpegang pada prinsip bahwa tidak mungkin untuk memahami suatu bagian masyarakat secara terpisah melalui bagian-bagian lain yang mempengaruhi opelirasinya. Buku ini juga menjelaskan bahwa menurut kamus umum Bahasa Indonesia (1983:763), arti politik sebagai berikut: segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik. Adapun ciri-ciri (atribut)

sistem politik menurut buku ini adalah, unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik, *i n p u t - o u t p u t*, diferensiasi d a l a m sistem dan integrasi

dalam sistem.

Selanjutnya, bab kedua berisi pembahasan mengenai budaya politik yang diawali dengan adanya kesadaran dari para ahli politik mengenai arti penting memahami disiplin ilmu lainnya. Pengertian budaya dalam buku ini adalah rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Kebudayaan juga mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Sedangkan budaya politik sendiri merupakan cerminan-cerminan sikap khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem politik. Tipe budaya politik dalam buku ini yaitu, budaya politik partisipan, budaya politik kaula atau subjek, dan budaya politik parokial.

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai struktur politik yang mendukung sistem politik melaksanakan berbagai aktivitas guna meraih berbagai tujuan bersama. Sistem politik melaksanakan berbagai aktifitas yang ditujukan untuk meraih tujuan-tujuan bersama yang telah dirumuskan tersebut. Untuk melaksanakan aktifitas yang kompleks itu, maka sistem politik memerlukan badan-badan atau struktur-struktur yang akan bekerja dalam sistem politik seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, demikianlah pengertian dan fungsi sistem politik menurut buku ini.

Dan bab keempat berisi sejarah sistem

politik Indonesia yang dapat dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Dalam buku ini menuturkan bahwa keberhasilan sistem politik dalam menghadapi tantangan baik yang datangnya dari dalam (domestik) maupun luar (internasional) sangat ditentukan oleh kapabilitas (kemampuan) sistemny. Pada zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritis liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudut moral. Sedangkan pada masa modern sekarang ini parameternya adalah tingkat prestasi (*performance level*), yaitu secara empirik apa yang sudah dukerjakan oleh sistem politik dapat terukur. Artinya, seberapa jauh kapasitasnya berhasil secara *real* dalam menghadapi berbagai tantangan, baik yang datangnya dari lingkungan dalam masyarakat internal (domestik) maupun lingkungan eksternal atau luar masyarakat (internasional).

Buku yang disusun secara sistematis, mudah dicerna dan dipahami ini merupakan acuan utama bagi mahasiswa yang mendalami mata kuliah *Sistem Politik Indonesia*. Juga merupakan referensi wajib bagi para praktisi organisasi politik, partai politik, elit politik, anggota legislatif, lembaga swadaya masyarakat, dan para birokrat, baik di pemerintah pusat maupun daerah.[]

*Pengarang : Beddy Iriawan

Maksudi

Penerbit : PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Kota Terbit : Yogyakarta

Tahun Terbit : 2012



Kunjungi halaman rumah maya kami di alamat

www.lpmarena.com
Portal Berita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Shohifur Ridho Ilahi: Sastra, sebuah Ekspresi Realitas

"Menggeluti teater dan sastra merupakan sebuah ekspresi kebudayaan"

Oleh: Sabik

Begitulah sepenggal perbincangan bersama Shohifur Ridho Illahi. Pegiat sastra kelahiran Sumenep, Madura tahun 1990. Saat ini masih belajar di jurusan Teologi-Filsafat UIN Sunan Kalijaga sembari bergiat di Teater ESKA, Masyarakat Bawah Pohon dan menjadi kontributor pada Teater Kertas PP, Banyuwang, Pamekasan Madura.

Ridho, begitu sapaan akrab yang kerap dipanggil oleh teman-teman di sanggar maupun teman-teman kuliahnya. Berperawakan kurus dengan tinggi badan sedang, nampak tengah bergumam membacakan syair-syair hingga terlihat lekukan tulang rahangnya.

Matanya agak sipit dengan bola mata yang hitam, dengan warna kulit sawo matang agak terbakar menambah kesan kehidupannya sering dihabiskan di bawah terik matahari, daripada berdiam diri di kamar.

Sastra baginya merupakan ekspresi kebudayaan. Bermedium bahasa, bermakna luas dan menggambarkan fenomena. Sastra memiliki peran serta fungsi dalam kehidupan sosial masyarakat. Membaca karya sastra pada hakikatnya membaca kehidupan, karena yang dikandungnya merupakan gambaran kehidupan dan reflektif bagi para pembacanya.

Dulce et utile 'menyenangkan dan berguna' itulah sastra.

Ia sering menghabiskan waktu berproses di sanggar. Sering kali ditemui sedang berbincang dengan teman-temannya. Begitupun saat ditemui untuk wawancara, sedang asik *ngobrol* bersama Abdul Qadir Al-amin (pecinta kesenian) mengenai keteateran dan kesusasteraan walaupun jam sudah menunjukkan dini hari. Di depan saung sanggar ESKA, di bawah pohon yang diberi nama Pohon Inspirasi menjadi tempat *tongkrongan* favoritnya untuk mencurahkan segala bentuk ekspresi yang akan tertuang dalam tulisan.

Selama perjalanan proses kreatifnya, Ridho telah banyak membuahkan karyanya. Puisi dan cerpennya terangkum dalam berbagai antologi: Sajak Perahu Yang Mengaji; sajak ini masuk dalam buku Sauk Seloko (Jambi International Poet Ghataring 2012); Perahu Yang Berangkat Kepada; dua



Dokumen Pribadi

puisi ini masuk dalam buku Serumpun (Antologi Puisi Penyair Yogya-Kuala Lumpur 2012), Pantai; Kampung; dan Batas Lubuk; tiga puisi ini masuk dalam buku Buah Tara No Ate (Temu Sastrawan Indonesia IV Ternate, 2011), Serumpun (Antologi Puisi Penyair Yogyakarta-Kuala Lumpur, 2012), Agonia (Antologi Puisi Yogya-Jember/ IBC & TI, 2012), Kubur Sajakku; Kubur Lautku; puisi ini masuk dalam buku Akulah Musi (Palembang International Poet Ghataring 2011). Cerpennya masuk dalam buku Jendela Dua Mata (DeKa Publishing, 2013) dan masih banyak karyanya yang tersangkut di berbagai media.

Puisinya yang berjudul Perahu Dini Hari diterjemahkan ke bahasa asing, termaktub dalam antologi *Poetry Poetry from 226 Indonesian Poets; Flows into the Sink into the Gutter*; dan *Poetry Poetry From 120 Indonesian Poets; Diverse* tersebar ke

berbagai negara luar terutama Prancis, Itali, Jerman, Spanyol dan Amerika.

Perkenalannya dengan dunia sastra dimulai ketika bergabung di komunitas teater bersama teman-temannya semasa belajar di Madrasah Aliyah (MA). "Lebih dulu mengenal teater, karena dalam teater itu ada persinggungan sastra, dinamika teater itu erat dengan sastra," ungkap Ridho sembari menerawang ke pepohonan berusaha menangkap kisah silamnya.

Berkecimpung di dunia sastra membuat ia lebih bisa memahami hidup dan perbedaan di lingkungannya. Menurutnya, sastra memberikan pandangan yang berbeda pada umumnya namun tidak lepas dari realitas sebagai sumber ekspresinya. "Segala macam bentuk kesenian merupakan respon atas realitas," papar Ridho. Sastra

menggambarkan kondisi lingkungan masyarakat dan sekitarnya. Dari sanalah, sastra memberikan pemahaman yang khas sebagai sebuah reflektif atas perkembangan pemikiran dan kondisi masyarakat.

Mempelajari sastra pada dasarnya merupakan usaha untuk memahami kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Sastra tidak hanya menggambarkan kondisi sosial yang terjadi, tetapi juga seperti pantulan perkembangan pemikiran dan kebudayaan masyarakatnya.

Ada cerita menarik semasa ia bergiat teater semasa di MA, ketika ia dan teman-temannya mementaskan drama teater di STAIN Pamekasan dengan judul naskah Tuhan Bermuka Dua karya temannya. Sepulang pentas ia dan teman-temannya langsung dihadapkan dengan pihak sekolah MA-nya. Dianggap telah melakukan sesuatu hal yang absurd-terkait dengan judul naskahnya, mereka pun mendapatkan peringatan dan hukuman pukul.

“Memang, pada waktu itu kita masih dikekang oleh persepsi lingkungan, namun bukan berarti harus berhenti dan mengikuti lingkungan pada umumnya, justru hal itu menjadikan batu loncatan bagi saya,” ungkap Ridho. “Karena dengan berproses di teater, mental seseorang akan terasah dan lebih terjamin untuk mampu menghadapi hidup,” tambahnya.

Bermula dari keinginannya untuk menyelami lebih dalam dunia sastra. Ridho memilih menginjakkan kakinya di tanah Yogyakarta pada tahun 2010. “Yogya itu daerah yang unik. Di Yogya banyak ragam

kultur dan kebudayaan yang saling bersinggungan, tidak dapat dipungkiri jikalau Yogya kental dengan kesenian,” kata Ridho.

Sembari meneruskan sekolahnya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, ia aktif bergiat di sanggar Teater ESKA yang dikenalnya terlebih dahulu sebelum masuk UIN, Komunitas Masyarakat Bawah Pohon dan berbagai komunitas seni di Yogyakarta. “Teater ESKA, saya sudah mengenalnya terlebih dahulu sebelum sekolah di UIN Yogya,” tegasnya.

Geliatnya dunia sastra di Yogya membuat ia keranjingan untuk mengikuti atau hanya sekedar *nimbrung bareng* berdiskusi bersama komunitas-komunitas seni. Baginya pengetahuan itu bisa didapatkan di mana saja. Meminta pengetahuan pada orang yang kaya akan wacana, itu akan semakin mengembangkan semangat keingintahuan kita. “Memperkaya wacana kesusasteraan dengan banyak keluar, ikut bergabung atau sekedar ikut berdiskusi dengan komunitas-komunitas seni di Yogya,” terangnya dengan semangat.

Dari berbagai pertemuan antar komunitas yang diikuti itulah, Ridho mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan karyanya ke berbagai kegiatan kesusasteraan yang digelar di berbagai daerah di Indonesia. Kerap kali diundang ke berbagai acara sastra, diantaranya Palembang International Poet Ghatering V 2011, Temu sastrawan Indonesia IV di Ternate 2011, Temu Penyair Yogyakarta-Kuala Lumpur 2012, Jambi International Poet Ghatering VI 2012, dan

Temu Penyair Lintas Daerah Indonesia di Pekalongan 2013.

“Suasana kesusasteraan di kampus UIN itu kurang, tapi kalau melihat pegiat sasteranya itu banyak sekali,” begitulah pendapat Ridho ketika ditanyai perihal semangat kesusasteraan di kampusnya.

Tidak seperti dahulu, kebanyakan mereka, mahasiswanya berproses di kampus sehingga menciptakan suasana sastra di sekitarnya. Sedikit bernostalgia di kampus UIN era '90-an, kita kenal Otto sukatno CR, Hamdy Salad, Labibah Zain, Abidah El-Khaliqy, Ali D' Musyirifah, Mathori A Elwa, dan banyak lagi.

Kurangnya ruang yang diberikan kampus untuk kegiatan seni membuat kebanyakan mahasiswa yang menekuninya memilih berproses di luar. Begitupun dengan denah dan struktur bangunannya. Gedung Gelanggang Mahasiswa misalnya, dilihat dari struktur bangunannya seperti letak penonton, posisi panggung dan dengan atap terbuka, terlihat seperti gedung olahraga daripada gedung teater atau pertunjukkan. “Situasi dan tata bangunan di kampus tidak memberikan ruang yang nyaman untuk berproses,” ucap Ridho.

Untuk lebih mendalami dunia sastra dan teater, Ridho senantiasa mengikuti berbagai diskusi dan acara apresiasi seni. “Tidak logis, seandainya kita meminta-minta pada orang miskin, mintalah pada orang yang sudah kaya,” ungkapnya sambil sedikit ketawa.[]

Shohifur Ridho Ilahi, pengrajin puisi dan teater, lahir di pesisir Pasongsongan, Sumenep, Madura 1990. Puisi-puisinya termaktub dalam buku Akulah Musi (PPN V Palembang, 2011), Tuah Tara No Ate (TSI IV Ternate, 2011), Setia Tanpa Jeda (UnSa, 2011), Atas Nama Bulan Yang Dicemburui Engkau (AGP, 2011), Serumpun (Antologi Puisi Penyair Yogyakarta-Kuala Lumpur, 2012), Agonia (Antologi Puisi Yogya-Jember/IBC & TI, 2012), Satu Kata Istimewa (Antologi Puisi Penyair Yogyakarta/ Ombak, 2012), Poetry Poetry from 226 Indonesian Poets; Flows into the Sink into the Gutter (beredar di beberapa Negara Eropa (Prancis, Itali, Jerman, Spanyol, dan Inggris) dan Amerika, Shell-JT, 2012), Poetry Poetry From 120 Indonesian Poets: Diverse (Shell-JT, 2012), Sauk Seloko (PPN VI Jambi, 2012), Dialog Tanean Lanjeng (Majelis Sastra Madura, 2013), Di Pangkuan Yogya (Ernawati Literary Fondation, 2012-2013), Sebab Cinta (Ernawati Literary Fondation, 2013) Indonesia Dalam Titik 13 (Antologi Penyair Lintas Daerah Indonesia, 2013), Qasidah Lintas Cahaya (Pena Nusantara, 2013), dan lain-lain yang tidak terhitung. Cerpennya masuk dalam buku Jendela Dua Mata (DeKa Publishing, 2013). Selain itu karyanya juga tersangkut di pelbagai media massa cetak dan online. Manuskrip puisinya berjudul Roket Perahu Mawar (2011-2012) dan Ziarah al-Hubb I (2009).

Kerap kali diundang ke berbagai acara sastra, diantaranya Palembang International Poet Ghatering V 2011, Temu sastrawan Indonesia IV di Ternate 2011, Temu Penyair Yogyakarta-Kuala Lumpur 2012, Jambi International Poet Ghatering VI 2012, dan Temu Penyair Lintas Daerah Indonesia di Pekalongan 2013.

Kini masih belajar di jurusan Teologi-Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sembari bergiat di Teater ESKA Yogyakarta, Masyarakat Bawah Pohon dan menjadi kontributor pada Teater Kertas PP. Banyuwang, Pamekasan Madura.

Email : laut.melaut@gmail.com / shohifurridho@gmail.com

CP : +6281939022366

FB : Shohifur Ridho Ilahi

Twitter : @shohifur

Alamat : Sanggar Teater ESKA Gedung Student Center Lantai III No. 62 Jl. Marsda Adisucipto UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Banyak tugas kuliah....? atau sedang SKRIPSI....? Mau di Print yg MURAH ?.....
Punya e-book...? Mau di Print.. ? Pengen yg MURAH juga yaa..?

PRINT cuma Rp. 100,- /Lbr

Berapapun Jumlahnya

Semua itu ada pada kami.....

PHOTOCOPY "CINTA"

"Ikut Serta Mencerdaskan Kehidupan Bangsa"

Alamat : Sapen GK1/ 650 Demangan Yogyakarta ,Telp./SMS : 087838478362
(Belakang Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

PENTING...!!

MENGUTAMAKAN KUALITAS DAN PELAYANAN



JAM LAYANAN
SENIN s/d SABTU
BUKA : 06.30 - 22.00 WIB
MINGGU
BUKA : 09.00 - 22.00

**Keluarga Besar
LPM ARENA**

Mengucapkan Selamat dan Sukses atas Terpilihnya

Taufiqurrohman

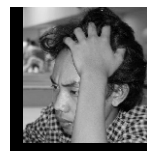
sebagai Pemimpin Umum 2013/2014

&

Robi Kurniawan

sebagai Pemimpin Redaksi 2013/2014

Selamat menanggung beban kerakyatan, bung!
Bergerak & lawan!



Hanya
untuk

Rp. 50 ribu

ruang iklan anda

Informasi & Contact Person

Andy :0819 099 055 66
Intan :0896 975 599 15
E-mail :lpm_arena@yahoo.com
Web :www.lpmarena.com

Alamat Redaksi & Tata Usaha :
Gedung Student Center Lt. 1 R. 62
Jl. Marsda Adisucipto UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta 55281

MEI BERGERAK!

Rezim Orba sudah tumbang seiring Reformasi 1998. Tapi apa buah dari Reformasi yang membawa Tragedi Trisakti dan Semanggi itu? Mari merenung sejenak.

Kini Reformasi sudah berjalan 15 tahun. Buahnya yang paling jelas adalah liberalisasi segala sektor. Sementara orang-orang Orba masih bercokol di pusat kekuasaan. Mafia Badan Likuidasi BANK Indonesia (BLBI) yang merampoki ratusan triliun uang rakyat masih saja berleha-leha. Reformasi mati sebelum tumbuh apalagi berkembang. Dan rakyat makin lama makin menderita. Liberalisasi segala sektor membuat rakyat kehilangan kemerdekaan dalam politik, kemandirian dalam ekonomi dan merosotnya martabat budaya.

Rakyat makin terseret dalam arus Kapitalisme internasional dan menceburkannya dalam jurang kesengsaraan. Otonomi daerah, sebagai kritik atas sentralisme Orba, malah memuluskan langkah perampokan kekayaan alam daerah oleh para pemodal. Sementara pemerintah daerah turut pula digandeng dalam merampoki rumah mereka sendiri.

Kapitalisasi pendidikan yang berwujud komersialisasi dan liberalisasi menjadikan pendidikan tidak terjangkau oleh seluruh rakyat. Selain itu, pendidikan malah menguatkan struktur dan system sosial yang menindas. Pendidikan bukan memanusiaikan manusia, tapi mencetak robot-robot yang disiapkan untuk dilempar ke pasar kerja. Intelektual-intelektual yang dihasilkan bukanlah intelektual organik yang memihak pada kepentingan rakyat, tapi intelektual karbitan dan palsu yang menjilat-jilat pantat kekuasaan.

Kini, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kian mahal biaya hidup. Kesehatan belum juga terjamin. Pendidikan tetap tak terjangkau oleh rakyat secara menyeluruh. Petani masih belum mandiri. Kesadaran rakyat masih saja terbonsai. Sementara partai politik hanya menjadi rumah para perampok. Dan lembaga-lembaga Negara tak lebih dari penyokong system kapitalisme internasional dalam topeng *welfare state*

Kesejahteraan yang tidak dirasakan oleh kebanyakan rakyat inilah yang turut membikin rakyat di berbagai daerah berniat memerdekakan diri. Seperti Aceh, Papua, Minahasa, dan bakal berlanjut di berbagai tempat lainnya lagi. Sebab NKRI tak lagi menjadi rumah yang menghidupi, tetapi neraka yang mematikan. Seperti slogannya: NKRI harga mati!

Kita tentu tidak bisa membiarkan hal itu terus berlanjut. Kesadaran kritis harus kita bangkitkan sejak dini. Revolusi pendidikan harus kita gerakkan. Kita harus membentuk solidaritas sesama manusia, sesama orang-orang tertindas untuk melawan segala bentuk kemiskinan dan pemiskinan, kebodohan dan pembodohan, penindasan dan ketidakadilan. Intelektual organik harus kita kuatkan, kita massifkan, sehingga menjadi pelopor perjuangan rakyat. Intelektual palsu harus ramai-ramai kita sadarkan, atau kita lempar saja ke keranjang sampah. Pokoknya kita harus bersatu melawan penindasan di muka bumi!

Maka, di Bulan Mei Bergerak ini kami menyatakan Sembilan hal:

1. Lawan Kapitalisasi Pendidikan!
2. Pendidikan Murah untuk Rakyat
3. Kesejahteraan untuk Buruh dan jaminan hari tua
4. Reformasi Agraria, Laksanakan UUPA
5. Adili Mafia BLBI
6. Kembalikan cita-cita Reformasi dan Adili Penjahat yang membunuh pahlwan Reformasi
7. Nasionalisasi aset-aset vital Negara
8. Jaminan Kesehatan untuk seluruh Rakyat Indonesia
9. Laksanakan Cita-cita Papua Sejahtera

ARENA "Kancah Pemikiran Alternatif"
14 Mei 2013

1. LPM Arena Yogyakarta akan mengadakan agenda up-grading untuk anggota magang 2013. Anggota Magang yang di Up-grading tahun ini sebanyak 19 orang. Dedik, salah seorang anggota magang LPM arena mengakui bahwa agenda Agenda up-grading ini untuk memantapkan ke-ARENA-an. "Ini sebagai tahap selanjutnya dari serangkaian agenda magang di ARENA," ujarnya. Begitu juga disampaikan Jamal, salah seorang Panitia Upgrading tahun ini. Upgrading adalah salah satu fase untuk mematangkan kaderisasi ARENA. "Setelah di up-grading akan ada agenda dan tugas-tugas organisasi. Teman-teman yang akan di Up-grading ini akan mengawal UIN selanjutnya," terang Jamal. Agenda ini akan dilaksanakan pada Sabtu-Minggu (18-19/05/2013) di Wanagama, Gunung Kidul.



2. Sanggar Nuun Yogyakarta akan menggelar Studi Pentas ke XIX. Pentas kali ini berjudul "SINDBAD, Pelayaran Ke-Tujuh" Sanggar Nuun akan pentas di tiga kota; Bogor, Jakarta dan Yogyakarta. Masing-masing kota pada 19 Mei di Gedung Kemuning Gading Bogor, 22 Mei di Balai latihan Kesenian Jakarta, 3 Juni di Societed Militer Taman Budaya Yogyakarta.

3. SUKA TV UIN telah mengadakan dialog bertepatan Pemilu dengan menghadirkan tiga orang narasumber. Mereka adalah Presiden DEMA, salah seorang anggota KPUM dan Redaktur LPM ARENA. Dialog membicarakan persiapan Pemilu dan banyaknya mahasiswa yang tidak mengenal Presiden DEMA. Video dialog dapat di unduh di www.lpmarena.com



4. Pemilu UIN Suka akan diadakan pada 3 Juni 2013. Jadwal pemilu ini telah diundur sebelumnya dari tanggal 27 Mei 2013. KPUM juga telah mengagendakan kampanye pada tanggal 23-30 Mei.

5. UKM JCM UIN Suka merilis sebuah film baru berjudul "MAGERSARI" film menceritakan Mardiharjo, seorang abdi dalem dan guru musik karawitan (musik gamelan), beliau hidup dengan seorang istri yang menjadi seorang guru tari di sanggar yang didirikannya bersama abdi dalem yang lain, sanggar tersebut menjadi sebuah pusat kesenian. Film ini memperlihatkan bahwa pengabdian dan keikhlasan menjadi kunci keselarasan hidup bagi seorang pak mardiharjo. Nilai kehidupan dengan kesederhanaan menjadi prioritas utama. Film ini akan di Publis bulan Juni 2013. Dan mahasiswa yang menginginkan film tersebut dipersilahkan mendatangi markas JCM di Student Center lantai 3.



Update Information:



Follow Us

@PersMaARENA

facebook

LIKE OUR FANPAGE:

LPM ARENA "KANCAH PEMIKIRAN ALTERNATIF"



..... Aku mengenali mereka
 yang tanpa tentara
 mau berperang melawan diktator
 dan yang tanpa uang
 mau memberantas korupsi
 (sepenggal "Pesan" Soe Hok Gie)



Jalan Malioboro, Yogyakarta, 1 Mei 2013



Mahasiswa, pekerja, dan seluruh elemen masyarakat melakukan aksi memperingati hari buruh se-dunia. Rela berpanas-panasan demi kemakmuran hidup buruh di Indonesia. Jika buruh di luar negeri sudah menuntut kebutuhan sekunder dan tersier. Buruh di Indonesia masih berkutat pada persoalan makan.